

**PEMIKIRAN IBNU QUDAMAH  
TENTANG PERJANJIAN UNTUK TIDAK BERPOLIGAMI DALAM AKAD  
NIKAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat dan Melengkapi Syarat-Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy)**



**Disusun Oleh :**

**REFRIANTO SAPUTRA  
10621003698**

**PROGRAM SI  
JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2013**

## ABSTRAK

Pernikahan adalah landasan bangunan, dan kedudukannya sangatlah penting dalam pandangan al-Qur'an, berdasarkan banyaknya ayat yang berbicara tentang hubungan pernikahan, hubungan orang tua dan anak, dan hubungan antar keluarga. Mempunyai anak dan mengasuhnya dengan baik sangatlah penting untuk mempertahankan kelangsungan spesies manusia. Hubungan pernikahan dan hubungan keluarga memberikan pondasi bagi lahirnya generasi-generasi yang akan datang.

Sebelum pernikahan dilaksanakan terkadang ada syarat-syarat yang disepakati oleh kedua mempelai atau dari pihak orang tua mempelai yang tujuannya demi kebaikan calon mempelai, karena untuk membina rumah tangga selanjutnya, hukum melakukan perjanjian dalam pernikahan adalah mubah, boleh dilakukan dan boleh juga tidak dilakukan, namun apabila dilakukan perjanjian pernikahan tersebut, maka hukum melaksanakannya inilah yang menjadi perbedaan para ulama, permasalahan perbedaan inilah yang menurut penulis perlu diteliti yakni pendapat Ibnu Qudamah selaku ulama pentarjih yang dengan tegas menyatakan bahwa apabila perjanjian poligami sudah dilakukan maka wajib hukumnya melaksanakannya.

Berdasarkan dengan latar belakang yang ada penulis merumuskan masalah dalam tiga hal yakni bagaimana pendapat Ibnu Qudamah tentang perjanjian untuk tidak berpoligami dalam akad nikah, bagaimana metode istinbat hukum yang digunakan oleh Ibnu Qudamah tentang perjanjian untuk tidak berpoligami dalam akad nikah. Dan Analisa Penulis Terhadap Pendapat Ibnu Qudamah tentang perjanjian untuk tidak berpoligami dalam akad nikah. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan (library research), dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah mengkaji dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan kajian ini. Adapun data primer diperoleh dengan kitab karangan Ibnu Qudamah yaitu *al-Mughni* dan *al-Muqni*'.

Hasil dari penelitian ini adalah perjanjian untuk tidak berpoligami menurut pandangan Ibnu Qudamah adalah memiliki faedah yang menjelaskan pada pendapat ulama lain yang mengatakan bahwa perjanjian ini mengharamkan yang halal yakni pada hal poligami adalah bukan demikian, Ibnu Qudamah berpendapat bahwa memberikan hak fasakh kepada istri bila suami tidak menepati janji yang telah diterimanya. Landasan hukum yang diambil Ibnu Qudamah yakni pada ayat Al – Quran, hadist dan juga kondisi dimasa itu tempat ia tinggal yakni di Syiria dimana perempuan banyak dipoligami dan diperlakukan tidak adil dan semena mena oleh suami.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT. Yang dengan rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan Judul **“Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Perjanjian Untuk Tidak Berpoligami Dalam Akad Nikah”**, shalawat beriring salam senantiasa tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW, penghulu segala Nabi yang telah membawa perubahan dari peradaban jahiliyah sehingga lebih beradap.

Keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari dukungan semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk itu melalui karya ini penulis menyampaikan terima kasih yang setulus – tulusnya kepada:

1. Yang mulia Ayahanda Muhammad Tabil. D dan Ibunda Melly Waty, kakanda Siska Fitri Dan Adinda Rizky Randa serta keluarga besar ananda yang dengan tulus dan ikhlas serta segala pengorbanan cinta, kasih sayang dan do’a yang telah diberikan kepada ananda dengan kesabaran, ketabahan yang tidak pernah putus dalam membimbing serta memberikan dorongna moril dan materil, serta senantiasa mendo’akan keberhasilan dan kebahagiaan ananda. Semua tidak bisa digantikan dengan apapun, semoga Allah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada mereka amin.
2. Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta pemabantu Rektor I, II dan III.
3. Bapak Dr. H. Akbarizan, MA selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum dan Permbantu Dekan I, II, III serta Bapakdan Ibu Dosen yang telah berjasa memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis.
4. Bapak Drs. Yusran Sabili M.ag selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini, yang telah banyak memberikan Ilmu, mengarahkan serta meluangkan waktunya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ahwalussyakhsiyyah (AH) Bapak Drs. Yusran Sabili M.Ag dan Bapak Drs. Zainal Arifin MA yang telah memberikan pelayanan dan bimbingan yang berharga selama ini.
6. Seluruh Staff dan Karyawan/karyawati Akademik Fakultas Syari'ah dan ilmu Hukum UIN SUSKA Riau.
7. Bapak perpustakaan UIN SUSKA Riau serta seluruh karyawan dan karyawati yang telah berjasa meminjamkan buku-buku untuk penulisan skripsi.
8. Rekan-rekan Mahasiswa/I Fakultas Syari'ah khususnya Jurusan Ahwalussyakhsiyyah (AH), Angkata 06', Aminuddin Lubis, Zulkhairi effendi, Ery suheri, Dody MJ, Ubaidillah, Muhammad Hidayat, Agus Setia Budi, Yenita dasopang dan lain-lain, teman – teman yang tidak mungkin di sebutkan satu persatu.
9. Rekan-rekan Team Futsal saya (Cricket FC).
10. Serta semua pihak yang tidak tersebutkan yang telah memberikan bantuan dorongan dan nasehatnya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu semua saran dan kritikan yang membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini sangat penulis harapkan dan akan penulis terima dengan tangan terbuka. Dalam pembuatan skripsi ini terkadang menemui hambatan – hambatan, namun dari keridhaan Allah dan do'a dari semua pihak maka penulis dapat melewatinya.

Atas peran serta dan partisipasi semua pihak penulis ucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 01 Februari 2013

Penulis

**Refrianto Saputra**  
**10621003698**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum agama yang sah dan pikiran yang sehat mengakui perkawinan sebagai suatu hal yang suci dan kebiasaan yang baik dan mulia. Jika diukur dengan neraca keagamaan, perkawinan menjadi dinding yang kuat, yang memelihara manusia dari dosa-dosa disebabkan oleh nafsu seksual di jalan yang haram.<sup>1</sup>

Pernikahan adalah landasan bangunan, dan kedudukan keluarga sangatlah penting dalam pandangan al-Qur'an, berdasarkan banyaknya ayat yang berbicara tentang hubungan pernikahan, hubungan orang tua dengan anak, dan hubungan antar keluarga. Mempunyai anak dan mengasuhnya dengan baik sangat diperlukan untuk mempertahankan kelangsungan spesies manusia. Hubungan pernikahan dan hubungan keluarga memberikan fondasi bagi lahirnya generasi-generasi yang akan datang.

Apabila dua orang pria dan wanita terikat dalam perkawinan, keduanya akan hidup nyaman dan tentram dua sejoli, hidup sebagaimana suami isteri dengan hak dan kewajiban bersama membangun suatu rumah tangga yang sejahtera, saling tolong-menolong, saling kasih dan mencintai. Apabila akad itu telah dilangsungkan maka landasan kukuh untuk berpijak dalam membangun suatu

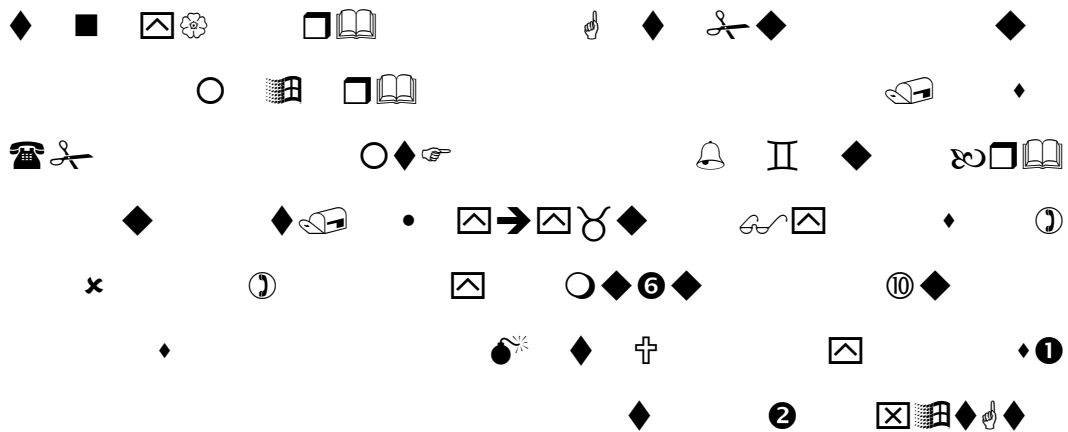
---

<sup>1</sup> H.S. M. Nasruddin Latif, *Ilmu Perkawinan Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, (Bandung : Pustaka Hidayat, 2001), h. 4

keluarga sejahtera telah terpancang, sehingga tercapailah suatu keluarga sejahtera, aman dan tentram.<sup>2</sup>

Islam menganjurkan perkawinan mengandung manfaat baik bagi yang bersangkutan maupun bagi masyarakat pada umumnya. Di antara manfaat perkawinan adalah bahwa perkawinan dapat menentramkan jiwa, menahan emosi, menutup pandangan dari segala yang dilarang Allah dan untuk menjaga kasih sayang suami isteri yang dihalalkan Allah.<sup>3</sup>

Sesuai dengan firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21 :



Artinya : Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri. Supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang berfikir. (Q. S. ar-Rum : 21).<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Kaelany HD, *Islam dan Aspek-aspek Kemasyarakatan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 141.

<sup>3</sup> . S. A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (tarj.) Agus Salim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Pustaka, 1998), h. 16.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1998), h. 644

Perkawinan merupakan ikatan yang kuat “ *mitsaqan ghalidhan*” antara pria dan wanita untuk selamanya. Oleh karena itu tujuan perkawinan adalah membentuk tatanan yang diliputi rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga. Tujuan tersebut dapat kita lihat dalam Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 bab I Pasal 1, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>5</sup>

Perkawinan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan) sebab kalau tidak dengan nikah tentu anak tidak berketentuan siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggungjawab atasnya. Dari perkawinan itu akan melahirkan keturunan yang sah dalam masyarakat, kemudian keturunan tersebut akan membangun rumah tangga yang baru dan keluarga yang baru.

Tidak diragukan bahwa perzinaan merupakan bahaya terburuk dalam perkembangan hidup manusia, betapa tidak, dan bagaimana akibatnya jika perzinaan itu merajalela dalam masyarakat, akan bertebaran manusia-manusia yang lahir dari pasangan pria dan wanita zina. Terlahir keturunan yang tidak sah, lalu muncul lagi masalah-masalah rumit yang berkaitan dengan masalah keluarga, masalah waris, masalah perwalian, pemeliharaan anak, dan sebagainya. Karena itulah, Islam menggariskan suatu aturan akad nikah untuk menghalalkan

---

<sup>5</sup> Redaksi Sinar Grafika, *UU Pokok Perkawinan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), h. 1

pergaulan pria dan wanita, yang sekaligus dapat menyelamatkan pasangan tersebut dari kebinasaan hawa nafsunya.<sup>6</sup>

عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة  
عن عبد الرحمن ابن يزيد قال:

: لا نجد شيئا .

. : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض  
للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فليصم فإن الصوم له وجاء

Artinya : dari Umar bin Hafash bin Giyaz telah berkata ayahku diceritakan pada kami al-A'masy berkata bahwa Umarah dari Abdurahman bin Yazid berkata: saya dating bersama 'Alqamah dan al-Aswad kepada Abdullah, maka berkata Abdullah: telah duduk seorang pemuda yang tidak mendapatkan sesuatu apapun bersama kami dan Nabi Saw, maka berkata Rasulullah Saw: Wahai generasi muda, barang siapa di antara kalian telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, karena sesungguhnya pernikahan itu menundukkan pandangan mata dan memelihara kemaluan, kalau belum mampu hendaklah berpuasa, karena puasa akan menjadi perisai baginya." (H.R Bukhari).<sup>7</sup>

Dengan perkawinan terjaga dan terpeliharalah perempuan yang bersifat lemah itu dari kebinasaan. Alangkah malang nasib wanita yang menyia-nyiakan kecantikannya waktu muda dengan berfoya-foya dan bergaul bebas tanpa batas. Kemudian setelah habis manis sepah dibuang maka wanita itu tinggal seorang

---

<sup>6</sup> Kaelani Ahmad, *loc. cit.*

<sup>7</sup> Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz. III, ( Lebanon: Dar al-Kitab al-Alamiyah, t.th)., h. 335



diri, tidak ada suami yang memeliharanya dan tidak ada anak yang menyayanginya.<sup>8</sup>

Suatu kenyataan yang harus diingat ialah bahwa dengan perkawinan, dapat dicapai pembagian kerja yang logis dan harmonis antara suami dan isteri guna ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup. Semua orang dapat melihat atau merasakan bahwa manusia sebagai pribadi bukanlah makhluk yang lengkap, yang dapat berdiri sendiri. Nyata bahwa perkawinan adalah jalan yang wajar untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia. Pemenuhan kebutuhan jasmani jika dialirkan pada saluran yang halal, niscaya tidak mengandung perasaan bersalah atau dosa dilakukan di jalan yang haram.<sup>9</sup>

Ayat tentang poligami dibolehkan dengan bersyarat, pada surat an-Nisa ayat 3, secara lebih khusus merujuk pada keadilan yang harus dilakukan kepada anak-anak yatim. Ayat ini diturunkan segera setelah perang Uhud ketika masyarakat muslim dibebankan dengan banyaknya anak yatim serta tawanan perang, maka perlakuan itu diatur dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan. Para ulama dan *fuqaha* telah menetapkan persyaratan bila seorang ingin menikahi lebih dari seorang isteri :

- Dia harus memiliki kemampuan dan kekayaan cukup untuk membiayai berbagai kebutuhan dengan bertambahnya isteri yang dinikahi

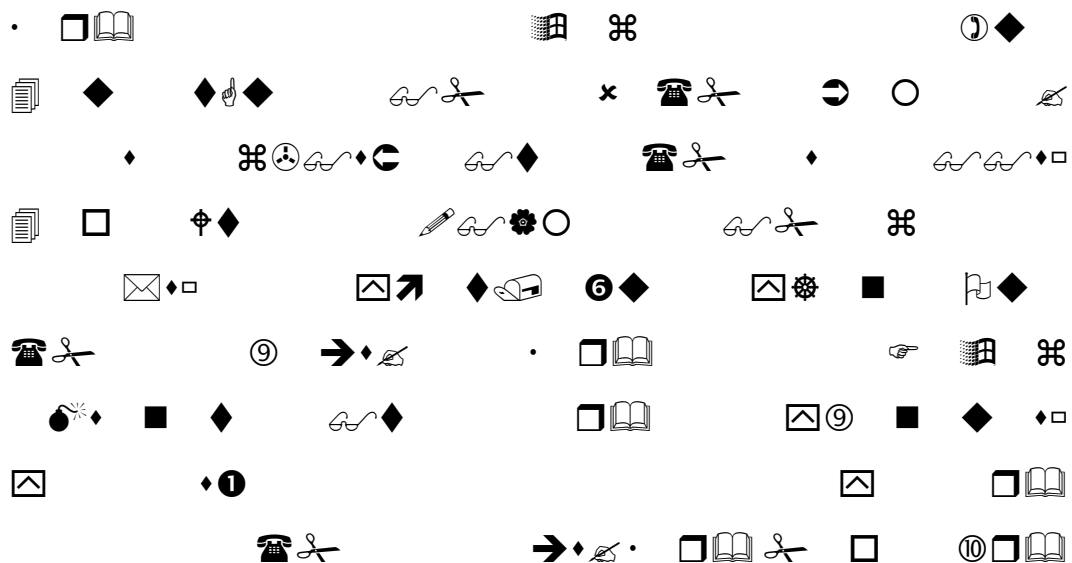
---

<sup>8</sup> Kaelany HD, *op. cit.*, h. 143

<sup>9</sup> H. S. M., Nasruddin Latif, *op. cit.*, h. 17

- Dia harus memperlakukan semua isterinya itu dengan adil. Setiap isteri diperlakukan secara sama dalam memenuhi hak perkawinan mereka serta hak-hak lainnya.<sup>10</sup>

Sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 3 :



Artinya : Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila mana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” ( Q. S. an-Nisa ayat 3).<sup>11</sup>

Ayat di atas jelas menunjukkan bahwa asas perkawinan dalam Islam pun adalah monogami. Kebolehan poligami, apabila syarat-syarat yang dapat menjamin keadilan suami kepada isteri-isteri terpenuhi. Namun demikian, hukum

<sup>10</sup> Abdurrahman I. Doi, *Perkawinan dan Syari'at Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 14

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 115

Islam tidak menutup rapat-rapat pintu kemungkinan untuk berpoligami atau beristeri dapat dipenuhi dengan baik.<sup>12</sup>

Dalam kitab Abu Daud dari Harits bin Qais, berkata :

أسلمت وعندي ثمان نسوة, فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم  
فقال: أختَر منهن أربعا.

Artinya : “Saya masuk Islam bersama-sama dengan delapan istri saya, lalu saya menceritakan kepada Nabi Saw”. maka sabda beliau “maka pilihlah empat orang di antara mereka”.<sup>13</sup>

Sebelum perkawinan dilaksanakan terkadang ada syarat-syarat yang disepakati oleh kedua mempelai atau dari pihak orang tua mempelai yang tujuannya demi kebaikan calon mempelai, karena untuk membina rumah tangga selanjutnya.

Di dalam kitab-kitab fiqh telah membahas mengenai syarat-syarat tersebut. Adapun pengertian syarat dalam perkawinan ialah :

الشروط في الزواج هي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر مما فيه  
غرض

Artinya : “Sesuatu yang disyaratkan oleh salah satu mempelai atas suatu yang lain, yang mana sesuatu itu memang dikehendaki adanya tujuan “.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 170.

<sup>13</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (tarj.), Muh. Thalib, (Bandung: al-Ma'arif, 1997), h. 150

<sup>14</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam*, juz, VII, (Beirut : Dar al-Fikr, 1997), h. 53

Membuat perjanjian dalam perkawinan hukumnya mubah, artinya boleh seseorang untuk membuat perjanjian dan boleh pula tidak membuat. Namun, apabila sudah dibuat bagaimana hukum memenuhi syarat yang terdapat dalam perjanjian perkawinan itu, menjadi perbincangan dikalangan ulama.<sup>15</sup>

Ada akad nikah yang dikaitkan dengan beberapa perjanjian, ada perjanjian yang sesuai dengan tujuan akad dan ada pula yang berlawanan dengan tujuan akad. Ada perjanjian yang manfaatnya kembali kepada pihak perempuan, dan ada pula yang dilarang oleh syara' masing-masing perjanjian itu mempunyai hukum tersendiri.<sup>16</sup>

Imam Hanafi mengatakan bahwa apabila diadakannya satu perjanjian dalam akad pernikahan oleh salah satu dari yang melaksanakan pernikahan (suami istri), maka perjanjian tersebut harus sejalan dengan tujuan akad dan tidak bertentangan dengan syariat. Maka perkawinannya sah dan mereka harus memenuhi perjanjian tersebut. Dan apabila perjanjian yang tidak sejalan dengan syariat tetapi tidak berlawanan dengan tujuan akad maka perkawinannya sah tetapi perjanjian itu sia-sia, tidak mengikat, suami tidak wajib memenuhi janjinya.<sup>17</sup>

Ulama fiqh sepakat bahwa perjanjian yang sesuai dengan tujuan akad dan tidak bertentangan dengan syara' harus dipenuhi oleh kedua mempelai. Misalnya perjanjian akan mempergauli isteri dengan baik, pakaian, tempat tinggal dan akan

---

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Islam Di Indonesia, Antar Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.146

<sup>16</sup> H. S. A. Al-Hamdani, *op. cit*, h. 59

<sup>17</sup> Abdurrahman al-Jaziry, *Fiqh 'Ala Madzahib al-'Arba'ah*, Juz IV, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 85

minta izin pada suami apabila isteri bepergian dan syarat lain yang sifatnya tidak menyeleweng dari hukum Allah.<sup>18</sup>

Mereka juga sepakat tentang melarang perjanjian yang tidak sesuai dengan tujuan akad, misalnya perjanjian bahwa suami tidak akan memberikan nafkah kepada isteri, tidak akan memberi maskawin atau isteri harus memberi nafkah kepada suami atau isteri hanya akan dipergauli pada siang hari, tidak malam hari atau perjanjian lain yang bertentangan dengan tujuan akad.

Akan tetapi, ulama fiqih berbeda pendapat tentang perjanjian - perjanjian yang tidak sejalan tetapi tidak berlawanan dengan tujuan akad. Artinya perjanjian tersebut memang bermanfaat bagi salah satu calon mempelai, misalnya perjanjian bahwa isteri tidak akan diusir dari rumah atau kampungnya, tidak bepergian bersama (isteri), tidak akan kawin lagi dan sebagainya.<sup>19</sup> Menurut sebagian ulama, syarat perjanjian yang dibuat bertentangan dengan syari'at islam atau hakikat perkawinan apapun bentuk perjanjian itu maka perjanjian itu tidak sah, tidak perlu diikuti, sedangkan akad nikahnya sendiri sah.<sup>20</sup> Jadi, jika syarat perjanjian perkawinan yang dibuat tidak bertentangan dengan syari'at islam atau hakikat perkawinan, maka hukumnya boleh (sah). Mereka beralasan dengan hadits :

---

<sup>18</sup> Lihat, Saleh bin Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, terj. Abdul Hayyie al-Khattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 660-663

<sup>19</sup> Wahbah al-Zuhaili, *op. cit.*, h. 34

<sup>20</sup> Lihat, Abu Malik bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, terj. Khairul Amru Harahap, Faisal Saleh, cet.2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 237-246

عن عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص ومعاوية وعمر  
رضي الله عنهم. : كل شرط ليس في كتاب الله فهو

Artinya : “Dari Umar r.a dan Sa’ad bin Abi Waqaz dan Muawiyah dan Amru bin  
Ash ra. Nabi Saw bersabda: Semua syarat yang tidak sesuai dengan  
kitabullah maka syarat itu batal meskipun seratus syarat”.<sup>21</sup>

Mereka berpendapat bahwa perjanjian - perjanjian di atas bukan dari kitab  
Allah, karena syari’at tidak menghendaknya dan perjanjian tersebut tidak akan  
menambahkan kebaikan akad dan tujuan akad serta bertentangan dengan *syara’*.<sup>22</sup>

عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن رسول الله ص.  
المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحلّ حر

Artinya : Dari Umar bin Auf al-Mazani r.a bahwa Sesungguhnya Rasulullah Saw  
telah bersabda: “Orang Islam itu terikat dengan syarat yang mereka buat,  
kecuali syarat menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.  
(HR. Turmudzi)<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut Lebanon: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1992), h. 251.

<sup>22</sup> Lihat, Syaikh Hassan Ayyub, *Fikih Keluarga*, terj. M.Abdul Ghofar, cet 1, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001) h. 106-108.

<sup>23</sup> Ismail al-Kahlani, *Subulu al-Salam*, juz III, (Semarang: Toha Putra, 2003), h. 59.

Mereka berpendapat bahwa perjanjian - perjanjian di atas dianggap mengharamkan yang halal, seperti kawin lagi (poligami) dan bepergian, kedua hal itu adalah halal.<sup>24</sup>

Sebagian ulama lainnya. Ibnu Qudamah<sup>25</sup>, sebagai salah seorang ahli *fiqh* dan *zuhud*, ia adalah seorang *mujtahid murajjih* ( *faqihunnafsi* )<sup>26</sup>, dan juga dikenal sebagai ulama yang bermazhab Hanbali dan juga sosok pemikir Islam yang banyak mewarnai khazanah intelektual pemikiran hukum Islam.<sup>27</sup>

Di dalam kitab “Al-Mughni” Ibnu Qudamah telah berpendapat bahwa: ada syarat yang manfaatnya kepada isteri, maka syarat itu harus dipenuhi oleh suami, isteri tidak akan diusir dari kampungnya/negarannya, tidak berpergian bersama isteri, tidak akan kawin lagi dan tidak akan menyakitinya. Jika syarat tersebut tidak dipenuhi suami, maka perempuan atau isteri dapat minta fasakh terhadap suami diantaranya Ibnu Qudamah berpendapat : “Apabila isteri memberi syarat pada suami tidak menikah selain isteri tersebut dan kemudian suami menikah, maka terjadi perceraian (*firaq*)”.<sup>28</sup>

---

<sup>24</sup> Sayid Sabiq, *op, cit*, h. 72

<sup>25</sup> Ia adalah seorang ahli *fiqh* dan *zuhud*, namanya Asy Syaikh Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah Bin Ahmad Bin Muhammad Ibnu Qudamah al-Hanbali al-Almaqdisi. Dilahirkan pada bulan Sya’ban 541 H. Lihat. Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Juz I (t.t : Dar al-Kutb al-Alamiyah, t.th) h. 3

<sup>26</sup> *Mujtahid murajjih* ( *faqihunnafsi* ) ialah mujtahid yang menekuni studi banding antara pendapat-pendapat berbeda dikalangan ulama, baik dalam satu madzhab atau dalam berbagai madzhab, menilai mana yang lebih kuat dalilnya, namun mereka tidak pernah melakukan ijtihad dalam memecahkan masalah baru.

<sup>27</sup> Ibnu Qudamah, *op.cit*, h. 5

<sup>28</sup> *Ibid*, Juz. VII, h. 448

Dalam kitab *al-Muqni'* karangan Ibnu Qudamah : mensyaratkan tambahan dalam mahar atau uang yang ditentukan, atau suami tidak akan meninggalkan negaranya (isteri). Atau tidak menikah selainnya atau tidak akan bermewah-mewah. Demikian ini sah apabila dijalankan. Apabila tidak, maka bagi isteri boleh fasakh nikah.<sup>29</sup>

Karena janji-janji yang diberikan oleh suami kepada isteri terdapat manfaat dan maksud, yang asalkan maksudnya tadi tidak menghalangi perkawinan maka sah hukumnya.

Kalau orang lain berkata bahwa perjanjian tidak akan berpoligami dalam akad nikah itu mengharamkan yang halal, maka Ibnu Qudamah menjawab : bukan mengharamkan yang halal, akan tetapi maksudnya untuk memberikan kepada perempuan hak meminta fasakh bila mana si suami tidak dapat memenuhi persyaratan yang diterimanya. Dan jika orang lain berkata bahwa hal itu tidak ada maslahatnya, maka Ibnu Qudamah menjawab: hal itu tidak benar, bahkan hal itu merupakan suatu kemaslahatan bagi perempuannya. Karena apa yang bisa menjadi suatu maslahat bagi satu pihak yang mengadakan akad berarti pula menjadi suatu maslahat didalam akadnya.<sup>30</sup> Bahwa perjanjian dalam perkawinan adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian dalam arti pihak-pihak yang berjanji untuk memenuhi syarat yang ditentukan.<sup>31</sup> Bila istri mensyaratkan bahwa ia tidak dimadu – suami tidak boleh berpoligami-,

---

<sup>29</sup> Ibnu Qudamah, *al-Muqni'*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, t.th.), h. 212

<sup>30</sup> Sayyid Sabiq, *op.cit*, h. 74.

<sup>31</sup> Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, jus VII, *loc.cit*



maka ia mewajibkan bagi si suami untuk dipenuhinya perjanjian-perjanjian terhadap istri tersebut.<sup>32</sup> Apabila tidak dipenuhi maka perkawinannya dapat dibatalkan (*fasakh*).<sup>33</sup>

Dalam hal ini, Ibnu Qudamah beraladaskan dengan hadits Nabi :

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، :  
: أحقّ الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج .

Artinya : Telah diceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf dari al-Laist berkata telah diceritakan kepada saya Yazid bin Abi Habib dari Abi al-Khair dari Uqbah bin Amir ra. telah berkata: Rasulullah Saw bersabda: Syarat yang lebih patut untuk dipenuhi yaitu perjanjian yang menyebabkan halalnya kehormatan perempuan. (HR Riwayat Bukhari).<sup>34</sup>

Selanjutnya, ditegaskan oleh Ibnu Qudamah, ketika dikatakan bahwa “kalau saya tidak berpoligami”, dan ungkapan tersebut disyaratkan dala akad pernikahan maka ungkapan tersebut adalah sebuah perjanjian. Hal ini tidaklah mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah SWT atau tidak mengharamkan yang halal, akan tetapi memberikan pilihan bagi siperempuan untuk meminta pembatalan pernikahan (*Fasakh*)<sup>35</sup>. Disamping itu, ketika suami melanggar perjanjiannya dan istri meminta *fasakh*, hal ini berlakulah sebagaimana orang

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Imam Bukhari, *Op.Cit* Juz II, h. 276

<sup>35</sup> Ibnu Qudamah, juz VII, *loc.cit*

yang dihukumi oleh Umar ibn Khattab, yaitu bahwa pihak perempuan (istri) telah mentalak kita.<sup>36</sup>

Dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa seorang istri diperbolehkan meminta *fasakh* kepada suami ketika suami tidak memenuhi perjanjian yang telah mereka sepakati disaat akad nikah dan juga suami wajib mengabulkan permohonan istri dalam meminta *fasakh*. Dan pendapat yang mengatakan kalau perjanjian tidak berpoligami dalam akad nikah dianggap mengharamkan yang halal terbantah, sebab perjanjian itu tidak mengharamkan yang halal tetapi memberikan pilihan bagi si perempuan untuk minta *fasakh* apabila syarat itu tidak dipenuhi.

Dari pembahasan yang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkajinya dalam sebuah skripsi, khususnya mengenai masalah ” **Pemikiran Ibnu Qudamah Tentang Perjanjian Untuk Tidak Berpoligami Dalam Akad Nikah**”.

## **B. Batasan Masalah**

Untuk memperjelas ruang lingkup pembahasan, maka masalah yang dibahas dibatasi pada masalah kekuatan perjanjian untuk tidak berpoligami pada akad nikah menurut pemikiran Ibnu Qudamah

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hal. 449

### **C. Rumusan Masalah**

Berpijak pada latar belakang masalah di atas, ada beberapa pokok permasalahan yang hendak dikembangkan dan dicari pangkal penyelesaiannya, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat Ibnu Qudamah tentang perjanjian untuk tidak berpoligami dalam akad nikah ?
2. Bagaimana metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh Ibnu Qudamah tentang perjanjian untuk tidak berpoligami dalam akad nikah ?
3. Analisa penulis terhadap pendapat Ibnu Qudamah tentang perjanjian untuk tidak berpoligami dalam akad nikah

### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemikiran Ibnu Qudamah. Selanjutnya pemikiran ini mempunyai tujuan:

1. Tujuan Penelitian.
  - a. Untuk mengetahui bagaimana pemikiran Ibnu Qudamah tentang perjanjian untuk tidak berpoligami dalam akad nikah
  - b. Untuk mengetahui metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh Ibnu Qudamah tentang perjanjian untuk tidak berpoligami dalam akad nikah
  - c. Untuk mengetahui Analisa penulis terhadap pendapat Ibnu Qudamah tentang perjanjian untuk tidak berpoligami dalam akad nikah
2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini untuk menambah khazanah keilmuan hukum Islam terutama tentang perjanjian untuk tidak berpoligami dalam akad nikah
- b. Penelitian ini dimaksudkan partisipasi penulis dalam mengkaji *fiqh* (hukum Islam) klasik untuk kemudian dapat menjadi referensi tambahan bagi pihak yang berkompetensi.
- c. Penelitian bertujuan untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana atau strata satu (s1) pada jurusan Ahwal Syakhshiyah fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.

## **E. Metode Penelitian**

Agar penulisan skripsi ini memenuhi kriteria karya ilmiah yang mengarah pada pokok kajian serta sesuai dengan tujuan penulisan skripsi ini, penulis ingin menggunakan metode pendekatan sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis dengan jalan mempelajari, menelaah dan memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang mempunyai relevansi dengan materi pembahasan.

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengkaji dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan kajian ini.

### 3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan adalah data skunder yang terdiri dari:

- Data primer yang diperoleh dengan kitab karangan Ibnu Qudamah yaitu *al-Mughni* dan *al-Muqni*'.
- Data skunder di dukung dengan buku-buku, kitab-kitab dan sumber lainnya mengenai dengan pembahasan ini.
- Data tersiar adalah literatur-literatur yang termasuk kategori sumber skunder lainnya adalah kitab-kitab yang membahas tentang fikih *munakahat* di antaranya adalah kitab *al-Umm*, *al-Muwattha*', kitab *Fiqh Sunnah* dan beberapa buku lainnya

### 4. Metode Analisis Data.

Agar data menghasilkan data yang baik dan kesimpulan baik pula, maka data yang terkumpul akan penulis analisa dengan menggunakan metode analisis sebagai berikut :

#### a. Metode Deskriptif

Metode deskriptif digunakan untuk menghimpun data aktual, mengartikan sebagai kegiatan pengumpulan data dengan melukiskan sebagaimana adanya, tidak diiringi dengan ulasan atau pandangan atau analisis dari penulis.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Wardi Bahtiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 60

Metode ini penulis gunakan untuk memahami pendapat dan istinbath hukum Ibnu Qudamah tentang perjanjian untuk tidak berpoligami dalam aqad nikah.

b. Metode Komparasi

Penelitian komparasi akan dapat menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan tentang benda, tentang orang, tentang prosedur, kerja, tentang ide-ide, kritik terhadap orang, kelompok, terhadap suatu ide atau suatu prosedur kerja.

Metode ini penulis akan membandingkan pendapat Ibnu Qudamah dengan pengertian dan dasar hukum poligami dan pendapat ulama lain tentang hal yang sama. Baik yang dekat dengan atau yang berbeda, penulis akan mengfokuskan pada bab IV.

c. Metode Konten Analisis

Suatu analisis data atau pengolahan secara ilmiah tentang isi dari sebuah pesan suatu komunikasi. Metode ini penulis gunakan untuk menganalisis data yang telah disajikan, yang akhirnya terdapat suatu kesimpulan.

## **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Penulisan ini dibagi menjadi lima bab, yang terbagi dalam beberapa sub bab.

Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut :

- BAB I      Pendahuluan, dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan.
- BAB II     Tinjauan tentang Ibnu Qudamah, yang terdiri dari biografi, pendidikan dan karya-karya Ibnu Qudamah,
- BAB III    Tinjauan umum tentang perjanjian dalam pernikahan, yaitu : pengertian, syarat dan hukum perjanjian dalam nikah, bentuk-bentuk perjanjian dalam pernikahan serta pendapat para ulama tentang perjanjian berpoligami dalam akad nikah. .
- BAB IV    Pemikiran Ibnu Qudamah tentang perjanjian untuk tidak berpoligami dalam akad nikah : Pendapat Ibnu Qudamah tentang perjanjian untuk tidak berpoligami dalam akad nikah, dan analisa penulis terhadap pendapat Ibnu Qudamah tentang perjanjian untuk tidak berpoligami dalam akad nikah.
- BAB V      Penutup, yaitu, kesimpulan dan saran

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PENGESAHAN

PENGESAHAN PEMBIMBING

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

|                      |    |
|----------------------|----|
| ABSTRAK .....        | v  |
| KATA PENGANTAR ..... | vi |
| DAFTAR ISI .....     | ix |

|   |          |
|---|----------|
| <b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>         | <b>1</b> |
| A. Latar Belakang Masalah.....          | 1        |
| B. Batasan Masalah.....                 | 13       |
| C. Rumusan Masalah .....                | 13       |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ..... | 14       |
| E. Metode Penelitian .....              | 15       |
| F. Sistematika Penulisan .....          | 17       |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>BAB II : BIOGRAFI IBNU QUDAMAH.....</b>        | <b>18</b> |
| A. Riwayat Hidup dan Pendidikan Ibnu Qudamah..... | 18        |
| B. Karya-Karyanya .....                           | 25        |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN DALAM<br/>PERNIKAHAN .....</b>                             | <b>28</b> |
| A. Pengertian, Syarat, dan Hukum Perjanjian Pernikahan .....   | 28        |
| B. Bentuk-Bentuk Perjanjian Pernikahan .....   | 30        |
| C. Pendapat Para Ulama Tentang Perjanjian Berpoligami<br>Dalam Akad Nikah Pandangan <i>Fuqaha'</i> ..... | 39        |



|  |           |
|--|-----------|
| <b>BAB IV : PENDAPAT DAN DASAR HUKUM IBNU QUDAMAH</b>  |           |
| <b>TENTANG PERJANJIAN UNTUK TIDAK BERPOLIGAMI</b>      |           |
| <b>DALAM AKAD NIKAH .....</b>                          | <b>46</b> |
| A. Perjanjian Untuk Tidak Berpoligami Dalam Akad Nikah |           |
| Menurut Pendapat Pemikiran Ibnu Qudamah .....          | 46        |
| B. Metode <i>Istinbath</i> Hukum Ibnu Qudamah Tentang  |           |
| Perjanjian Untuk Tidak Berpoligami Dalam Akad          |           |
| Nikah .....  | 48        |
| C. Analisa Penulis Terhadap Pemikiran Ibnu Qudamah     |           |
| Tentang Perjanjian Untuk Tidak Berpoligami Dalam Akad  |           |
| Nikah .....  | 50        |
| <b>BAB V : KESIMPULAN .....</b>                        | <b>67</b> |
| A. Kesimpulan .....                                    | 67        |
| B. Saran .....   | 67        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                            | <b>69</b> |
| <b>LAMPIRAN :</b>                                      |           |
| <b>I. DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS.....</b>            | <b>xi</b> |

## BAB II

### BIOGRAFI DAN KARYA IBNU QUDAMAH

#### A. Riwayat Hidup dan Pendidikan Ibnu Qudamah.

Nama lengkapnya adalah Muffaq al-Din Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad Ibn Muhammad Ibn Qudamah Ibn Miqdam Ibn Nasir Ibn Abdullah al-Maqdisi al-Dimasyqi.<sup>1</sup> Seorang ulama besar di bidang ilmu fiqh, yang kitab-kitab fiqhnya merupakan standar bagi mazhab Hambali, beliau lahir pada bulan Sya'ban tahun 541 H/1147 M di Jamail Damaskus Suriah.<sup>2</sup>

Ibnu Qudamah menurut sejarawan termasuk keturunan Umar Ibnu Khatab r.a. melalui jalur Abdullah ibnu Umar Ibnu al-Khatab (Ibnu Umar)<sup>3</sup>, ia hidup ketika perang Salib sedang berlangsung, khususnya di daerah Syam (Suriah) sekarang. Sehingga pada tahun 551 H (usia 10) tahun ia bersama keluarganya terpaksa mengasingkan diri ke Yerusalem dan bermukim di sana selama dua tahun, kemudian keluarga ini pindah lagi ke Jabal Qasyiun, sebuah desa di Libanon.<sup>4</sup> Di desa inilah ia memulai pendidikannya dengan mempelajari Al-Qur'an dan menghafal *Mukhtasyar al-Kharaqi* dari ayahnya sendiri. Selain dengan seorang ayah, ia juga belajar dengan Abu al-Makarim, Abu al-Ma'ali, Ibnu Shabir serta beberapa Syaikh di daerah itu.

---

<sup>1</sup> Abdul Qadir Badran, terjemah Syaikh Muwafaq *Muallif al-Muhgni dalam al-Muhgni*, (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt), h. 2

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> Abdul Aziz Dahlan (eds.) *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Iktiyar Baru Vann Deve, 1997), h. 619

Pada tahun 561 H dengan ditemani putra pamannya al-Hafidz Abdul Ghoni, Ibnu Qudamah berangkat ke Baghdad, Irak untuk menimba ilmu, khususnya di bidang fiqh. Ia menimba ilmu di Irak selama empat tahun dari beberapa Syaikh, di antara Syaikh Abdul Qadir al-Jailani (ahli fiqh), 470H/1077M – 561H /1166M) Hibatullah al-Daqaq, Ibnu Bathi, Sa'adullah bin Dujaji, Ibnu Taj al-Qara, Ibnu Syafi'i, Abu Zuriah dan Yahya Ibnu Tsabit.<sup>5</sup> Kemudian ia kembali lagi ke Damaskus dan menimba ilmu lagi dari para ulama besar disana.

Pada tahun 574 H ia pergi ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji, sekaligus menimba ilmu dari Syaikh al-Mubarak Ibn Ali Ibn al-Husain Ibn Abdillah Ibn Muhammad al-Thabakh al-Baghdadil (wafat 575H), seorang ulama besar mazhab Hambali di bidang fiqh dan ushul fiqh. Kemudian ia kembali ke Baghdad dan berguru selama satu tahun kepada Abu Al-Fath Ibn al-Mani, yang juga seorang ulama besar mazhab Hambali di bidang fiqh dan ushul fiqh.<sup>6</sup> Setelah itu kembali ke Damaskus untuk menyumbangkan ilmunya dengan mengajar dan menulis. Buku murid-muridnya yang menonjol adalah antara lain adalah dua orang anak saudaranya sendiri, yakni Abu al-Fajr Abdurahman Ibn Muhammad bin Qudamah, ketika itu (Ketua Mahkamah Agung di Damaskus). Dan al-Imam Ibrahim Ibnu Abdul Wahib Ibnu Ali Ibnu Suru al-Maqdisi al-Dimasqi (dikemudian hari menjadi ulama besar di kalangan mazhab Hambali).<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Ahmad Mustofa al-Maraghi, (terj.) *Tafsir al-Maraghi*, (Semarang: Toha Putra, 1993), h. 195-196

<sup>6</sup> Abdul Qadir Badran, *loc, cit*

<sup>7</sup> Ahmad Mustofa al-Maraghi, *loc, cit*

Sejak menjadikan dirinya sebagai pengajar di daerah itu sampai wafat pada tahun 620 H/1224 M.<sup>8</sup> Ibnu Qudamah tidak pernah keluar lagi dari Damaskus. Di samping mengajar dan menulis buku, sisa hidupnya juga diabadikannya untuk menghadapi perang Salib melalui pidato-pidatonya yang tajam dan membakar semangat umat Islam. Ia dimakamkan di Jabal Qasyiun di bawah gua yang terkenal dengan sebutan gua “Taubat” dengan meninggalkan jasa yang sangat banyak dalam bidang keilmuan yang bisa diambil manfaatnya oleh orang banyak sampai masa sekarang.

Ibnu Qudamah dikenal ulama sezamannya sebagai seorang ulama besar. Imamnya kelompok Hambaliyah yang zuhud, wara dan ahli ibadah serta menguasai semua bidang ilmu, baik Al-Qur’an dan tafsirnya, ilmu hadits, fiqh dan ushul fiqh, faraid, nahwu, hisab dan lain sebagainya. Ia juga memiliki pengetahuan yang luas tentang persoalan-persoalan yang dihadapi umat, cerdas, lemah lembut, tawadhuk, sayang pada orang miskin dan dicintai teman-teman sejawatnya. Tidak kurang dari gurunya sendiri Abu Al-Fat Ibnu al-Manni mengakui keunggulan dan kecerdasan Ibnu Qudamah, sehingga ketika ia akan meninggalkan Irak setelah berguru kepadanya, gurunya ini enggan melepasnya. Seraya berkata “tinggallah engkau di Irak ini karena jika engkau pergi, tidak ada ulama lagi yang sebanding dengan engkau di sini.”<sup>9</sup> Sabth Ibnu al-Jauzi berkata : setelah Abu Umar dan Ahmad tidak ada lagi yang lebih zuhud dan wirai dibandingkan Ibnu Qudamah, sedang Ibnu Taimiyah mengakui “ setelah Auza’i

---

<sup>8</sup> Abdul Aziz Dahlan, *op, cit*, h.

<sup>9</sup> Ahmad Mustofa al-Maraghi, *loc, cit*

(salah seorang pengumpul hadits pertama di Syam ulama besar di Syuriah) adalah Ibnu Qudamah.<sup>10</sup>

Selain itu ia juga memiliki beberapa keistimewaan, (karamah) yang banyak diceritakan orang, diantaranya adalah yang terjadi pada Abu Abdullah Ibn Fadhal al-A'nahi sebagaimana yang diceritakan oleh Sabth Ibn al-Jauzi di mana ia pernah berkata dalam hati (*ber'azam*), seandainya aku mampu, pasti akan kubangun sebuah madrasah untuk Ibnu Qudamah dan akan aku beri seribu *Dirham* setiap harinya, “selang beberapa hari ia bertandang ke kediaman Ibnu Qudamah untuk bersilaturahmi, seraya tersenyum, Ibnu Qudamah berkata kepadanya, ketika seorang berniat melakukan sesuatu yang baik, maka dicatat baginya pahala niat tersebut.<sup>11</sup>

Sebagai seorang ulama' besar dikalangan madzhab Hanbali, ia meninggalkan beberapa karya besar yang menjadi standar dalam madzhab Hanbali. Karyanya dalam bidang ushuluddin sangat bagus, kebanyakan menggunakan metode para muhaditsin yang dipenuhi hadits-hadits atsar beserta sanadnya, sebagaimana metode yang digunakan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal dan Imam-imam hadits lainnya.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Abdul Aziz Abdurrahman Al-Said, seorang tokoh fiqh arab Saudi, karya-karya Ibnu Qudamah dalam berbagai bidang ilmu seluruhnya berjumlah 31 karya atau buah, dalam ukuran besar dan kecil.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid*,

<sup>11</sup> Abdul Qadir Badran, *loc, cit*

<sup>12</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, , Cet.4, (Jakarta: PT. RajaGrafindo persada, 2002), h 281

Imam Ibnu Qudamah wafat pada hari Sabtu, tepat di hari Idul Fithri tahun 629 H. Ia dimakamkan di kaki gunung Qasiun di Shalihiya, di sebuah lereng diatas Jami' Al-Hanabilah (masjid besar para pengikut madzhab Imam Ahmad bin Hanbal).<sup>13</sup>

### **Nasabnya**

Beliau adalah Syaikh Muwaffaq al-Din Abu Muhammad<sup>14</sup>, Abdullah bin Ahmad Ibn Muhammad Ibnu Qudamah al-Hanbali bin Miqdam Ibnu Abdullah al-Maqdisi al-Dimasyqi. Ibnu Qudamah menurut sejarawan merupakan keturunan Umar Ibnu Khatab r.a. melalui jalur Abdullah Ibnu Umar Ibnu al-Khatab (Ibnu Umar)<sup>15</sup>

### **B. Karya-karyanya**

Pengakuan ulama besar terhadap luasnya Ibnu Qudamah dapat dibuktikan zaman sekarang melalui karya-karya tulis yang ditinggalkannya. Sebagai seorang ulama besar di kalangan mazhab Hambali, ia meninggalkan beberapa karya besar yang menjadi standar dalam mazhab Hambali. Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam "*Thabaqat Al-Hambaliyah*", sebagaimana dikutip Abdul Qadir Badran mengatakan "Ibnu Qudamah memiliki karya yang banyak dan bagus, baik dalam bidang *furu'* maupun ushul, hadits, bahasa dan tasawuf. Karyanya dalam bidang Ushuludin sangat bagus, kebanyakan menggunakan metode para *muhaditsin* yang

---

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> Abdul Azis, *loc.cit*

<sup>15</sup> M. Ali Hasan, *op.cit* ,h. 279

dipenuhi hadits-hadits dan *atsar* beserta *sanad*-nya, sebagaimana metode yang digunakan oleh Imam Ahmad Ibnu Hambal dan imam-imam hadits lainnya.<sup>16</sup>

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Abdul Aziz Abdurahman Al-Said, seorang tokoh fiqh Arab Saudi, karya-karyanya Ibnu Qudamah dalam berbagai bidang ilmu seluruhnya berjumlah 31 karya atau buah, dalam ukuran besar dan kecil.<sup>17</sup>

Karya-karya Ibnu Qudamah dalam bidang Ushuludin (1) *al-Burhan fi Masail al-Qur'an*, membahas ilmu-ilmu Qur'an terdiri hanya satu juz, (2) *Jawabu Mas'alah Waradat fi al-Qur'an* hanya satu juz, (3) *Al-I'tiqat* satu juz, (4) *Mas'alah al-Uluwi* terdiri dari dua juz, (5) *Dzamal-Takwil* membahas persoalan takwil, hanya satu juz, (6) kitab *al-Qadar* berbicara tentang qadar hanya satu juz, (7) kitab *Fatla'il al-Sahaban*, membahas tentang kelebihan sahabat, dalam dua juz, (8) *Risalah Ila Syaikh Fahrudin Ibn Taimiyah fi Tahlidi ahli al-Bidai fi al-Naar* (9) *Mas'alatul fi tahrini al-Nazar fi kutubi Ahli al-Kalam*<sup>18</sup>.

Dalam bidang hadits ia memiliki beberapa karya *Mukhtasar al-Ilal al-Khailal*, berbicara tentang cacat-cacat hadits, dalam satu jilid besar, *Mukhtasar fi Gharib al-Hadits*, membicarakan tentang hadits gharib, *Masyikh Ukhra*, terdiri dari beberapa juz.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 6

<sup>17</sup> Abdul Aziz Dahlan, *op, cit*, h. 620

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> *Ibid*

Karya Ibnu Qudamah bidang fiqh (1) *Al-Mughni*, kitab fiqh dalam 10 jilid, memuat seluruh persoalan fiqh, mulai ibadah muamalah dengan segala aspeknya, sampai masalah perang, (2) *Al-Kafi*, kitab fiqh dalam 4 jilid (3) *Al-Muqni'*, kitab fiqh dalam 3 jilid besar, tetapi tidak selengkap *Al-Muqni'*, (4) *Al-Umdah fi al-Fiqh*, kitab fiqh dalam satu kitab kecil yang disusun untuk para pemula. Dengan mengemukakan argumentasi dari Al-Qur'an dan sunnah. (5) *Mukhtasar al-Hidayah li Abi al-Khatib*, dalam satu jilid (6) menasik haji tentang tata cara haji, dalam satu juz, (7) *Dzamal-Was-Was* satu juz, (8) *Roudlah al-Nazdzir fi Ushul al-Fiqh*, membahas persoalan ushul fiqh dan merupakan kitab ushul tertua dalam mazhab Hambali, di kemudian hari diringkas oleh Najamuddin al-Tufi, selain itu beliau juga memiliki fatwa dan risalah yang sangat banyak.<sup>20</sup>

Ibnu Qudamah juga memiliki karya dalam bidang bahasa dan Nasab: (1) *Qun'ah al-Arib fi al-Gharib*, hanya satu jilid kecil, (2) *Ath-Tibyan an Nasab al-Quraisyin*, menjelaskan nasab-nasab orang Quraisy, hanya satu juz, (3) *Ikhtisar fi Nasab al-Anshar*, kitab satu jilid yang berbicara tentang keturunan orang-orang Ansor.<sup>21</sup>

Dalam bidang tasawuf, ia memiliki beberapa karya: kitab *Al-Tawabin fi al-Hadits*, membicarakan masalah-masalah taubat dalam hadits terdiri dari dua juz, (2) kitab *Al-Mutahabiin fillah*, dalam 2 juz, (3) kitab *Al-Riqah wa al-Bika'* dalam

---

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 621

<sup>21</sup> *Ibid*



dua juz, (4) *Fadhail al-Syura*, kitab dua juz yang berbicara tentang keutamaan bulan asyura, (5) *Fadhail al-Asyari*.<sup>22</sup>

Sekalipun Ibnu Qudamah menguasai berbagai disiplin ilmu tetapi yang menonjol, sebagai ahli fiqh dan ushul fiqh. Keistimewaan kitab *al-Mughni* adalah, bahwa pendapat kalangan madzhab Hanbali senantiasa dibanding dengan madzhab yang lain. Apabila pendapat madzhab Hanbali berbeda dengan madzhab lainnya, senantiasa diberikan alasan dari ayat atau hadits yang menampung pendapat madzhab Hanbali itu, sehingga banyak sekali yang dijumpai ungkapan:

وَلَنَا حَدِيثُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya: “Alasan kami adalah hadits Rasulullah Saw.”<sup>23</sup>

Keterikatan Ibnu Qudamah kepada teks ayat dan hadits, sesuai dengan prinsip madzhab Hanbali. Oleh sebab itu, jarang sekali ia mengemukakan argumentasi berdasarkan akal. Kitab *al-Mughni (fiqh)* dan *Raudhah an-Nadhair (ushul fiqh)* adalah dua kitab yang menjadi rujukan dalam madzhab Hanbali dan ulama’ lain-lainnya dari kalangan yang bukan bermadzhab Hanbali.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Abdul Qadir Badran, *op, cit*, h.6

<sup>23</sup> M. Ali Hasan, *op.cit* ,h. 281

<sup>24</sup> *Ibid*, h.282

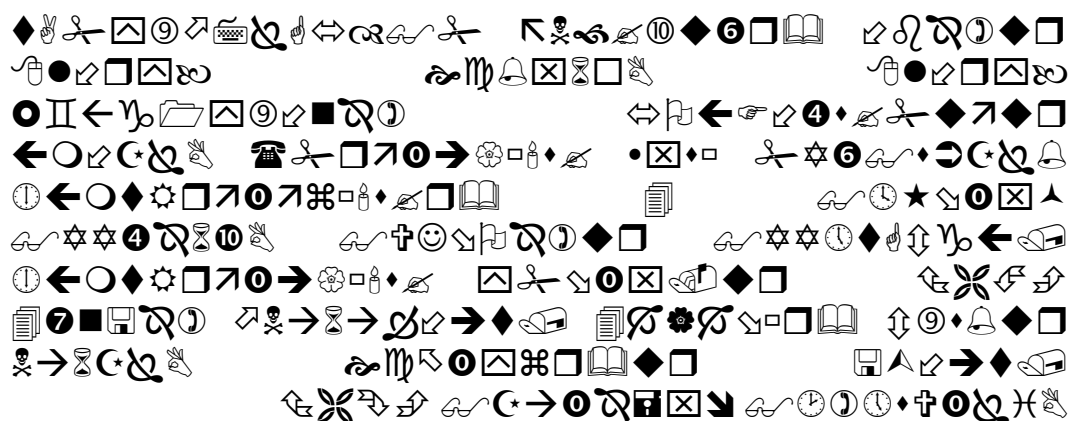
# BAB III

## TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN DALAM PERNIKAHAN

### A. Pengertian dan dasar hukum perjanjian

+Menurut bahasa “akaq” mempunyai beberapa arti mengikat, sambungan, dan janji. Secara istilah adalah ‘ahdu dalam al-Quran mengacu kepada pernyataan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau untuk tidak mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain<sup>1</sup>.

Perjanjian perkawinan (mitshaq az-zauziyyah) dalam at-tanjil al-hakim terdapat dalam firman Allah SWT:



Artinya : “Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian telah bergaul dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”(QS. An-nisa [4]: 20-21).

---

<sup>1</sup> Hendi suhendi, *Fikih MUamalah*, ( Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010), h 44

Dalam ayat diatas nampak, bahwa dalam perkawinan terdapat sebuah perjanjian yang kuat yang diambil oleh para isteri dari para suami mereka. Muatan perjanjian tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an, karena perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum al-Qur'an, meskipun seratus syarat, hukumnya batal. Demikian juga perjanjian yang tidak bertujuan menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

Perjanjian perkawinan mempunyai syarat, yakni perjanjian yang dibuat itu tidak bertentangan dengan syari'at Islam atau hakikat perkawinan. "Jika syarat perjanjian yang dibuat bertentangan dengan syari'at Islam atau hakikat perkawinan apapun bentuk perjanjian itu maka perjanjian itu tidak sah, tidak perlu diikuti, sedangkan akad nikahnya sendiri sah". Jadi, jika syarat perjanjian perkawinan yang dibuat tidak bertentangan dengan syari'at Islam atau hakikat perkawinan, maka hukumnya boleh (sah), tetapi jika syarat itu bertentangan dengan syari'at Islam atau hakikat perkawinan maka hukum perjanjian itu tidak boleh (tidak sah).

Contoh syarat yang tidak sesuai dengan syari'at Islam, misalnya, dalam perkawinan itu si istri tidak akan kawin lagi. Perkawinan itu sendiri sah, tetapi syaratnya tidak sah. Berdasarkan sabda Nabi SAW yang artinya : "Segala syarat yang tidak terdapat dalam Kitabullah adalah batal, sekalipun 100 kali syarat". Sabdanya lagi dengan artinya :

عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً. (رواه ترمذي و صحيح)

Artinya : “Orang-orang Islam itu menurut syarat mereka, kecuali apabila berupa syarat yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.”

Tentang perjanjian ini, Kholil Rahman menyebutkan macam-macam sifat perjanjian :<sup>2</sup>

a. Syarat-syarat yang menguntungkan istri, seperti syarat untuk tidak dimadu. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, ada yang mengatakan sah, dan ada yang mengatakan tidak sah. Sayid Sabiq misalnya, membolehkan si istri menuntut fasakh apabila suami melanggar perjanjian tersebut.

b. Syarat-syarat yang bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh maksud akad itu sendiri. Seperti, tidak boleh mengadakan hubungan kelamin, tidak ada hak waris-mewarisi di antara suami dan istri, tidak boleh berkunjung kepada kedua orang tua, dan lain-lain. Syarat-syarat semacam ini tidak sah, dan tidak mengikat.

c. Syarat-syarat yang bertentangan dengan ketentuan syara' seperti jika akad nikah sudah dilangsungkan, agar masing-masing pindah agama, harus mau makan daging babi, dan sebagainya. Perjanjian semacam ini tidak sah, dan bahkan akad nikahnya juga tidak sah.

Rukun yang pokok dalam perkawinan, yaitu ridhanya laki-laki dan perempuan serta persetujuan mereka untuk mengikat hidup berkeluarga. Karena persamaan ridha dan setuju bersifat kejiwaan yang tidak dapat diikat dengan mata kepala, maka harus ada perlambang yang jelas untuk menunjukkan kemauan

---

<sup>2</sup>Kholil Rahman, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995), h. 160

mengadakan ikatan suami isteri. Perlambang itu ditetapkan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang mengadakan akad.<sup>3</sup>

## **B. Bentuk-Bentuk Perjanjian Perkawinan**

Bentuk-bentuk perjanjian perkawinan adalah:

1. Ta'lik talak.
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
3. Hukum Perjanjian Perkawinan

Dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan diatur masalah perjanjian perkawinan dalam pasal 29. Bunyi selengkapnya adalah sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawina. Setelah masa isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.

3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

---

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *op. cit.*, h. 48

<sup>4</sup> Ahmad Rofiq, (Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995), h.

Penjelasan pasal 29 tersebut menyatakan bahwa perjanjian dalam pasal ini tidak termasuk taklik talak. Namun dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 pasal 11 menyebutkan satu aturan yang bertolak belakang.<sup>5</sup>

1. Calon suami isteri dapat mengadakan perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

2. Perjanjian yang berupa taklik talak dianggap sah kalau perjanjian itu diucapkan dan ditandatangani suami setelah akad nikah dilangsungkan.

3. Sighat taklik talak ditentukan oleh Menteri Agama.

Yang menarik adalah kompilasi menggaris bawahi pasal 11 Peraturan Menteri Agama tersebut. Kompilasi sendiri memuat 8 pasal tentang perjanjian perkawinan yaitu pasal 45 sampai dengan pasal 52.

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

1. Taklik talak, dan
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Jadi praktis perjanjian perkawinan seperti dijelaskan dalam penjelasan pasal 29 Undang-undang No. 1 tahun 1974, telah diubah atau setidaknya diterapkan bahwa taklik talak termasuk salah satu macam perjanjian perkawinan, dalam kompilasi dan detail-detailnya dikemukakan.

---

<sup>5</sup> Ahmad Rofiq, *op.cit*, h. 67

**Pasal 46 kompilasi** lebih jauh mengatur:<sup>6</sup>

1. Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
2. Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul terjadi kemudian tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.
3. Perjanjian taklik talak bukan perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali talak talik sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Ayat 3 diatas sepintas bertentangan dengan pasal 29 Undang-undang perkawinan ayat 4 yang mengatur bahwa selama perkawinan berlangsung perjanjian tidak dapat diubah kecuali ada persetujuan kedua belah pihak, dan tidak merugikan pihak ketiga. Dari sinilah maka dalam penjelasannya disebutkan tidak termasuk talik talak. Karena naskah yang sudah ditandatangani suami. Oleh karena itu pula, perjanjian talik talak sekali sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Karena itu seblum akad nikah dilakakukan Pegawai Pencatat perlu meneliti betul perjanjian perkawinan yang dibuat oleh kedua calon mempelai, baik secara material atau isi perjanjian itu, maupun teknis bagai mana perjanjian itu telah disepakati oleh mereka bersama. Sejauh perjanjian itu berupa taklik talak. Menteri

---

<sup>6</sup> Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Departemen Agama RI Deriktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam 1997/1998

agama telah mengaturnya. Adapun teks. (sighat) taklik talak yang diucapkan suami sesudah dilangsungkan akad nikah adalah sebagai berikut: Sesudah akad nikah, saya.....bin....berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan saya akan pergauli istri saya bernama....binti....dengan baik (mu'asyarah bil ma'ruf) menurut ajaran syari'at Islam.

Selanjutnya saya mengucapkan sighat tklik talak atas isteri saya itu seperti berikut:<sup>7</sup>

Sewaktu-waktu saya:

1. meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut,
2. atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,
3. atau saya mengikuti badan/jasmani isteri saya itu,
4. atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya.

Kemudian isteri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduan dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut, dan isteri saya itu membayar uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang iwadl (pengganti) itu dan kemudian memberikanya untuk ibadah sosial.

---

<sup>7</sup> Abd. Rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2003, cet. ke-2



Demikian juga menjadi tugas Pengadilan Agama ketika menerima gugatan perceraian dari pihak isteri dengan alasan pelanggaran perjanjian dalam taklik talak atau tidak, haruslah benar-benar meneliti apakah si suami menyetujui dan mengusapkan sighat taklik talak atau tidak. Secara yuridis formal, persetujuan dan pembacaan sighat taklik talak dapat dilihat pada Akta Nikahnya, meski atau belum sepenuhnya dapat dijamin kebenarannya. apabila si suami menandatangani di bawah sight taklik talak, ia dianggap menyetujui dan membaca sight tersebut, kecuali ada keterangan lain.

Memperhatikan muatan sighat taklik talak tersebut, kandungan maksudnya cukup baik dan positif, yaitu melindungi perempuan dari kewenang-wenangan suami dalam memenuhi kewajibannya, sebagai hak-hak yang seharusnya diterima si isteri, meskipun sesungguhnya isteri, telah mendapatkan berupa khulu' (gugat cerai) maupun hak fasakh. Karena itu sekali lagi, yang perlu diperhatikan adalah pencatatan apakah suami benar-benar menyetujui dan membaca dan menandatangani sighat taklik talak tersebut atau tidak. Ini dimaksudkan agar terjadi keliruan dan kesulitan dalam menyelesaikan persoalan yang timbul.

Persoalan harta benda merupakan pokok pangkal yang dapat menimbulkan berbagai perselisihan dan ketegangan rumah tangga atau malahan menghilangkan kerukunan di dalamnya, maka undang-undang Perkawinan memberi peluang ataupun petunjuk mengenai perbuatan perjanjian untuk pengaturan hak atas harta benda bersama antara suami dan istri, tercantum dalam pasal 35 sampai dengan pasal 37. isi ketentuan dari pasal-pasal ini ada kaitan atau pengaruh dari prinsip

mengenai kecakapan wanita yang telah nikah yang dianut oleh kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Hanya saja terdapat perbedaan yang bertolak belakang antara kedua sumber hukum itu dan untuk lebih jelasnya bias dibandingkan dua pasal berikut ini. Pasal 119 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berbunyi :<sup>8</sup>

Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan istri.

Sedangkan **pasal 35 Undang-undang Perkawinan** berbunyi :

Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang tidak menentukan lain.

Jadi bertolak belakang yang tampak dari dua pasal tersebut mengenai keadaan bila akad nikah tidak diikuti dengan perjanjian harta benda bersama, yakni pasal awal dikutip menentukan harta di bawah penguasaan bulat dalam satu kesatuan demi hukum, sedangkan pasal berikutnya harta benda tetap di bawah penguasaan masing-masing.

Sepanjang dalam perjanjian tersebut tidak ada pihak-pihak lain yang memaksa. Ini sejalan dengan hadist riwayat al-Bukhori yang artinya : “Barangsiapa mensyaratkan pada dirinya sendiri untuk maksud taat (kepada Allah

---

<sup>8</sup> *Ibid*

dan Rasul-Nya), dalam keadaan tidak terpaksa, maka ia wajib memenuhinya” (Riwayat al-Bukhori)

Kata Umar bin al-Khattab : “Sesungguhnya keputusan hak terletak pada syarat-syarat yang ditetapkan, dan pada kamu apa yang kamu syaratkan” (Riwayat al-Bukhari).

Apabila perjanjian yang telah disepakati bersama antara suami dan istri, tidak dipenuhi oleh salah satu pihak, maka pihak lain berhak mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama untuk menyelesaikannya.

Dalam hal pelanggaran dilakukan suami misalnya, istri berhak meminta pembatalan nikah atau sebagai alasan perceraian dalam gugatan. Demikian juga sebaliknya, jika istri yang melanggar perjanjian di luar taklik talak, suami berhak mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama.

### **C. Pendapat Para Ulama Tentang Perjanjian Berpoligami Dalam Akad Pernikahan**

Akad nikah ada yang dikaitkan dengan beberapa syarat. Syarat itu ada yang sesuai dengan tujuan akad dan ada yang berlawanan dengan tujuan akad. Syarat ada yang kembali pada pihak perempuan dan ada pula syarat yang dilarang oleh syara’.<sup>9</sup> Masing-masing syarat itu mempunyai ketentuan-ketentuan tersendiri.

Sebelum penulis menyebutkan syarat atau perjanjian yang boleh dibuat oleh suami isteri, terlebih dahulu akan penulis sebutkan pengertian perjanjian atau syarat-syarat dalam nikah :

---

<sup>9</sup> H.S. A. Al-Hamdani, *op. cit.*, h. 32

الشروط في الزواج هي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر مما فيه  
غرض

Artinya : Syarat dalam pernikahan ialah : sesuatu yang disyaratkan oleh salah satu mempelai atas suatu yang lain, yang mana sesuatu itu memang dikehendaki adanya tujuan.

Kemudian yang dimaksud dengan syarat tersebut adalah syarat-syarat yang bersamaan dengan ijab qabul artinya ijab itu akan berhasil dan melahirkan sebuah syarat dari beberapa syarat.<sup>10</sup> Jadi mengenai perjanjian atau persyaratan antara suami dan isteri, memang patut atau layak diadakan karena untuk menuju pernikahan abadi.

Kemudian syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi antara dua mempelai tersebut. Selanjutnya akan disebutkan tentang syarat-syarat yang wajib dipenuhi dan syarat-syarat yang tidak wajib dipenuhi.

#### 1. Syarat yang Wajib Dipenuhi

Syarat yang wajib dipenuhi yaitu syarat yang termasuk rangkaian dan tujuan perkawinan, dan tidak mengandung hal-hal yang menyalahi hukum Allah dan Rasulnya, seperti syarat menggauli isteri dengan baik, memberikan belanja, pakaian dan tempat tinggal yang pantas. Tidak mengurangi sedikitpun hak-haknya dan memberikan bagian kepadanya semua dengan isteri-iseterinya yang lain (kalau di madu), tidak boleh keluar rumah suaminya kecuali dia

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

izinkan, tidak mencemarkan suaminya, tidak berpuasa sunnah kecuali kalau diizinkan suaminya, tidak menerima orang lain di rumah suaminya kecuali dengan izinnya dan lain sebagainya.<sup>11</sup>

## 2. Syarat yang Tidak Wajib Dipenuhi

Di antara syarat yang tidak wajib dipenuhi tetapi syaratnya sah, yaitu syarat yang menyalahi hukum perkawinan, seperti syarat yang tidak memberikan belanja, tidak mau bersetubuh atau kawin tanpa mahar atau memisahkan diri dari suaminya atau isterinya yang harus memberi nafkah atau memberikan suatu hadiah kepada suaminya atau dalam seminggu hanya tinggal bersama dalam semalam atau hanya mau tinggal dengan isterinya di siang hari, tidak di malam hari.

Syarat-syarat ini semuanya bathal dengan sendirinya, sebab menyalahi hukum-hukum perkawinan dan mengandung hal-hal yang mengurangi hak-hak suami isteri sebelum ijab qabul, karena itu tidak sah.<sup>12</sup>

## 3. Syarat-syarat yang Hanya Untuk Perempuannya

Di antara syarat-syarat yang guna dan faedahnya untuk perempuan saja adalah seperti syarat-syarat suaminya tidak boleh menyuruh dia (isteri) keluar dari rumah atau kampung halamannya, tidak bepergian bersama isteri, atau tidak mau dimadu dan lain sebagainya.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Sayyid Sabiq, *op. cit.*, h. 169

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Juz. VII, Dar al-Kutub al-Alamiyah, h. 448

Maka ulama berpendapat bahwa akad nikahnya tetap sah tetapi syarat-syarat tersebut tidak berlaku dan suaminya tidak harus memenuhinya. Pendapat ini dianut oleh mazhab Syafi'i.<sup>14</sup>

Mereka beralasan dengan hadits Nabi Saw :

عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. (رواه ترمذي و صحيح)

Artinya : Orang Islam itu terikat dengan syarat yang mereka buat kecuali kalau syarat tadi menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

Mereka mengatakan bahwa, syarat-syarat di atas dianggap mengharamkan yang halal seperti syarat tidak boleh kawin (poligami) atau tidak boleh berpergian bersama isteri, padahal kedua hal tersebut adalah halal.<sup>15</sup> Juga hadits Nabi : artinya : *"Dari Umar r.a : Semua syarat yang tidak sesuai dengan kitabullah maka syarat itu batal meskipun seratus syarat"*.

Mereka mengatakan bahwa syarat-syarat di atas tidak ada dalam kitab Allah, tidak ada ketentuannya dalam agama.<sup>16</sup>

Kemudian segolongan ulama lain berpendapat bahwa syarat di atas, wajib dipenuhi oleh suami, jika tidak dipenuhi maka isteri berhak minta fasakh.

Mereka beralasan dengan hadits Nabi saw :

---

<sup>14</sup> Wahbah al-Zuhaili, *op. cit.*, h. 46-47

<sup>15</sup> Ibnu Qudamah, *loc. cit.*

<sup>16</sup> Ibnu Qudamah, *loc. cit.*

عن عقبه بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن  
أحق الشرط أن يوفى به ما استحلتم به الفروج (رواه الجماعة )

Artinya : Dari Uqbah bin Amir telah berkata : telah bersabda Rasulullah Saw :

Syarat yang lebih patut untuk dipenuhi yaitu perjanjian yang menyebabkan halalnya kehormatan perempuan. (HR Riwayat Bukhari dan Muslim dari Uqbah bin Amir).

Diriwayatkan oleh Atsram dengan sanadnya sendiri, pernah seorang laki-laki kawin dengan perempuan dengan perjanjian dia tinggal di rumahnya, kemudian suami bermaksud mengajak isterinya pindah rumah, lalu mereka (keluarganya) mengadukannya kepada Umar Ibn Khattab, maka Umar memutuskan perempuan itu berhak atas janji suaminya.<sup>17</sup>

Menurut Ibnu Taimiyah di dalam *al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyah* sebagai berikut : apabila pihak suami memberikan syarat kepada pihak isteri dalam akad atau mereka sepakat sebelum akad, agar isteri tidak pindah dari rumahnya atau negerinya atau suami tidak kawin lagi, maka isteri berhak minta haknya, syarat seperti itu sah. Demikian menurut mazhab Imam Ahmad.

Jika suami mensyaratkan perawan, cantik atau janda lalu ternyata tidak demikian, maka ia berhak mentalaq. Begitu menurut salah satu riwayat dari Imam Ahmad, Malik dan Syafi'i. Dan seandainya suami membuat syarat

---

<sup>17</sup> Sayyid Sabiq, *op. cit.*, h. 74

bahwa isteri harus melaksanakan shalat lima waktu dengan baik, lalu isteri ternyata tidak dapat memenuhi maka suami berhak mentalaknya.<sup>18</sup>

#### 4. Syarat yang Dilarang Agama

Ada syarat-syarat dalam perkawinan yang dilarang oleh agama dan di haramkan untuk menepatinya yaitu syarat yang diajukan oleh seorang isteri kepada suaminya agar suami mentalaq perempuan madunya.<sup>19</sup>

لايحل أن تتكح امرأة بطلاق أخرى

Artinya : Tidak halal bagi perempuan yang dikawin dengan meminta lainnya agar ditalaq” (H.R Ahmad).

Larangan hadits tersebut menunjukkan bahwa perbuatan yang dilarang itu batal. Larangan ini batal karena menggugurkan haknya suami memadu. Syarat ini tidak sah sebagaimana kalau isteri mensyaratkan kepada suaminya agar membatalkan jual beli.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Syekh Islam Taimiyah, *al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyah*, Beirut Libanon: Dar al-Ilmiyah, 1995, h. 184-185.

<sup>19</sup> Sayyid Sabiq, *op. cit.*, h. 167

<sup>20</sup> *Ibid.*



## BAB IV

### PENDAPAT DAN DASAR HUKUM IBNU QUDAMAH TENTANG PERJANJIAN UNTUK TIDAK BERPOLIGAMI DALAM AKAD NIKAH.

#### A. Perjanjian Untuk Tidak Berpoligami Dalam Akad Nikah Menurut Pendapat Pemikiran Ibnu Qudamah

Pernikahan merupakan perilaku sakral yang ter-*maktub* dalam seluruh ajaran agama. Dengan pernikahan diharapkan akan menciptakan pergaulan laki-laki dan perempuan menjadi terhormat,<sup>1</sup> interaksi hidup berumah tangga dalam suasana damai, tentram dan rasa kasih sayang antara anggota keluarga, yang semuanya bermuara pada harmonisasi keluarga.<sup>2</sup> Namun fakta yang berkembang, harmonisasi keluarga terganggu oleh fenomena poligami. Walaupun secara *normatif* poligami diakui oleh hukum Islam, tetapi karena suatu hal, maka poligami ditentang banyak intelektual, lebih-lebih penggerak wanita. Apalagi sinyalemen bahwa poligami yang dipraktikkan oleh banyak muslim telah mereduksi rasa penghargaan kepada wanita dan nilai-nilai keadilan.<sup>3</sup>

Belakangan muncul wacana tentang perjanjian dalam pernikahan (perjanjian pranikah), yaitu perjanjian yang diproyeksikan sebagai “senjata” bagi wanita untuk mencegah calon suami untuk berpoligami. Jika diuraikan perjanjian

---

<sup>1</sup> Abd Nashr Taufik al-Athar, *Saat Anda Meminang*, Terj. Abu Syarifah dan Afifah (Jakarta: Pustaka Azam, 2000), h. 5

<sup>2</sup> *Ibid*, h.5

<sup>3</sup> *Ibid*, h.5-6

pernikahan secara etimologi, suatu perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan dan mengikat kedua belah pihak calon pengantin yang akan menikah dan berlaku sejak pernikahan dilangsungkan.<sup>4</sup> Dalam hal perjanjian pernikahan ini, bagaimana kekuatan hukum dari perjanjian pernikahan ini?

Di antara perjanjian pernikahan ini, yang guna dan faedahnya untuk perempuan saja adalah seperti perjanjian pernikahan “suaminya tidak boleh menyuruh dia (isteri) keluar dari rumah atau kampung halamannya, tidak bepergian bersama isteri, atau tidak mau dimadu (dipoligami) dan lain sebagainya”.<sup>5</sup>

Di dalam kitab al-Mughni, Ibnu Qudamah telah berpendapat bahwa: ada syarat yang manfaatnya kepada isteri, maka syarat itu harus dipenuhi oleh suami, misalnya: “isteri tidak akan diusir dari kampungnya/negarannya, tidak bepergian bersama isteri, tidak akan kawin lagi dan tidak akan menyakitinya”.<sup>6</sup> Jika syarat tersebut tidak dipenuhi suami, maka perempuan atau isteri dapat minta fasakh terhadap suami diantaranya Ibnu Qudamah berpendapat :

وإن تزوجها وشرط لها أن لا يترج عليها فلها فراقه إذا تزوج عليها

Artinya: “Apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, dan disyaratkan dalam akad oleh Laki-laki (Suami) Kepada Perempuan (Isteri) untuk

---

<sup>4</sup>Ibid. h. 6

<sup>5</sup>Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Juz VII, (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, t.th), h.448

<sup>6</sup>Ibnu Qudamah, *op.cit*, h.448

tidak Memadunya maka hak Perempuan tersebut meminta cerai/fasakh  
(*firaq*) Bila Suami Menikah Lagi.”<sup>7</sup>

Kata *ج عايتها قه ا فلها* yang menunjukkan kalimat ketegasan Ibnu Qudamah tentang diisyaratkannya boleh terjadi *fasakh* apabila suami melanggar perjanjian *فلهافسخ* yang salah satunya adalah melakukan perjanjian tidak berpoligami dan dilanggar suami maka istri boleh minta *fasakh*.<sup>8</sup>

Dalam kitab *al-Muqni'* karangan Ibnu Qudamah : mensyaratkan tambahan dalam mahar atau uang yang ditentukan, atau suami tidak akan meninggalkan negaranya (isteri). Atau tidak menikah selainnya atau tidak akan bermewah-mewah. Demikian ini sah apabila dijalankan. Apabila tidak, maka bagi istri boleh *fasakh* nikah.<sup>9</sup>

Karena janji-janji yang diberikan oleh suami kepada istri terdapat manfaat dan maksud, yang asalkan maksudnya tadi tidak menghalangi perkawinan maka sah hukumnya. Kalau orang lain berkata bahwa perjanjian tidak akan berpoligami dalam akad nikah itu mengharamkan yang halal, maka Ibnu Qudamah menjawab : bukan mengharamkan yang halal, akan tetapi maksudnya untuk memberikan kepada perempuan hak meminta *fasakh* bila mana si suami tidak dapat memenuhi persyaratan yang diterimanya. Dan jika orang lain berkata bahwa hal itu tidak ada maslahatnya, maka Ibnu Qudamah menjawab: hal itu tidak benar, bahkan hal itu merupakan suatu kemaslahatan bagi perempuannya. Karena apa yang bisa

---

<sup>7</sup> *Ibid*, h. h.447

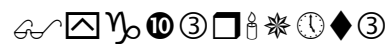
<sup>8</sup> *Ibid*, h 448

<sup>9</sup> Ibnu Qudamah, *al-Muqni'*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, t.th), h.212

menjadi suatu masalah bagi satu pihak yang mengadakan akad berarti pula menjadi suatu masalah didalam akadnya.<sup>10</sup>

Mengenai perjanjian untuk tidak berpoligami dalam akad nikah adalah sah syaratnya tidak sia-sia, mengikat dengan akad, apabila perjanjian tidak ditepati oleh suami kepada isteri pada waktu akad nikah termasuk perjanjian tersebut di atas tergolong syarat rusak dan mengikat dengan akad.

Adapun dasar hukumnya terdapat dalam al-Qur'an pada surat al-Maidah ayat 1 :



Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu.*” (Q.S. al-Maidah :1) <sup>11</sup>

Kata ”*aufu*” merupakan perintah dalam ayat ini menunjukkan betapa al-Qur'an sangat menekankan perlunya memenuhi akad dalam segala bentuk dan maknanya dengan pemenuhan yang sempurna kalau perlu melebihi dari seharusnya serta mengecam mereka yang menyia-nyiakannya.<sup>12</sup> Ini karena rasa aman dan bahagia manusia secara pribadi atau kolektif tidak dapat dipenuhi kecuali bila mereka memenuhi ikatan-ikatan perjanjian yang mereka jalin

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *op.cit*, h. 74

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *op, cit*, h. 156

<sup>12</sup> Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, ( Ciputat: Lentera Hati, 2002), h.

sedemikian tegas al-Qur'an dalam kewajiban memenuhi akad hingga setiap muslim diwajibkan memenuhinya, walaupun itu merugikannya. Ini karena kalau dibenarkan melepaskan ikatan perjanjian, maka aman masyarakat akan terusik. Kerugian akibat seseorang memenuhi perjanjian terpaksa ditetapkan demi memelihara rasa amani dan ketenangan anggota masyarakat, dan memang kepentingan umum harus didahulukan atas kepentingan perorangan.<sup>13</sup>

Dari riwayat Ibnu Abbas r.a bahwa yang dimaksud dengan akad nikah ialah perjanjian yang telah diadakan Allah terhadap hamba-hambanya yaitu, apa-apa yang telah diharamkan dan apa-apa yang dihalalkan apa-apa yang telah diwajibkan dan apa-apa yang telah dibataskan dalam Al-Qur'an seluruhnya bahwa semua itu tidak boleh dilanggar.<sup>14</sup>

Ibnu Qudamah memiliki pengetahuan yang luas tentang persoalan – persoalan yang dihadapi umat, misalnya tentang poligami. Beliau tidak menentang atau menolak poligami akan tetapi memberi syarat kepada suami untuk tidak berpoligami.<sup>15</sup> Pendapat Ibnu Qudamah itu tidak bisa lepas dari kondisi masyarakat tempat beliau tinggal (Syuriah), dimana poligami merajalela. Beliau berkesimpulan bahwa akan sangat sulit mendidik masyarakat yang poligamus karena tidak adanya jaminan keadilan diantara para anggota keluarga. Laki-laki di Syuriah lebih mengutamakan kenikmatan seksual semata dan menuruti hawa

---

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> Sayyid Sabiq, *op.cit*, h. 74

nafsunya. Oleh karena itu, berdasarkan kaidah fiqh “ mencegah kerusakan didahulukan dari menarik kemaslahatan”<sup>16</sup>.

Imam Hambali berpendapat apabila, seorang suami mensyaratkan atas dirinya bahwa dirinya tidak akan menikah dengan wanita lain (poligami), maka sahlah akadnya dan syarat yang ditetapkan tersebut. Konsekuensinya adalah suami wajib memenuhi syarat tersebut, dan bila tidak, maka istri berhak *memfasakh* (memutuskan atau membatalkan) perkawinannya.<sup>17</sup>

Madzhab Hanbali membagi persyaratan dalam nikah menjadi tiga bagian, salah satunya adalah Persyaratan yang harus ditunaikan, yaitu persyaratan yang manfaatnya dan faedahnya kembali kepada sang wanita. Misalnya sang wanita mempersyaratkan agar sang suami tidak membawanya merantau atau tidak berpoligami. Maka wajib bagi sang suami untuk memenuhi dan menunaikan persyaratan ini. Jika sang suami tidak menunaikan syarat ini maka sang wanita berhak untuk membatalkan tali pernikahan. Pendapat ini diriwayatkan dari Umar bin Al-Khatthab, Sa'ad bin Abi Waqqash, Mu'aawiyah, dan 'Amr bin Al-'Aash radhiallahu 'anhum.<sup>18</sup>

Zainab Hasan Syarqowi berpendapat menguatkan pendapat para fuqaha mazhab Hanbali karena kuatnya dalil-dalil yang mereka gunakan dan syarat-syarat ini mengandung manfaat bagi wanita, sementara syarat tersebut tidak mengandung madhorot bagi pihak laki-laki, dan ia telah rela menyepakatinya, pemenuhan

---

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 74

<sup>17</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur A.B, dkk. (Jakarta: Lentera Basritama, 2002), h. 319

<sup>18</sup> Ibnu Qudamah, *al-Muqni'*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, t.th), h.212

syarat-syarat ini juga akan menambah kasih sayang dan ketentraman hubungan suami isteri sehingga mengantarkan mereka kepada kehidupan bahagia<sup>19</sup>.

Secara logika sesungguhnya syarat yang diminta oleh wanita dalam akad nikahnya mengandung manfaat dan maksud si wanita, tidak bertentangan dengan maksud pernikahan maka syarat itu sah dan tetap baginya, ia berhak membatalkan bila syarat itu tidak ditepati.<sup>20</sup>

## **B. Metode *Istinbath* Hukum Ibnu Qudamah Tentang Perjanjian Untuk Tidak Berpoligami Dalam Akad Nikah.**

Menurut Ibnu Qayyim, salah seorang pengikut madzhab Hanbali, ada lima landasan pokok yang dijadikan dasar penetapan hukum dan fatwa madzhab Hanbali. Pertama, nash (Al-Qur'an dan Sunnah). Jika ia menemukan nash, maka ia akan berfatwa dengan Al-Qur'an dan Sunnah dan tidak berpaling pada sumber lainnya. Kedua, fatwa sahabat yang diketahui tidak ada yang menentanginya.<sup>21</sup>

Ketiga, jika para sahabat berbeda pendapat, ia akan memilih pendapat yang dinilainya lebih sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW.<sup>22</sup> Jika ternyata pendapat yang ada tidak jelas persesuaiannya dengan Al-Qur'an dan Sunnah,

---

<sup>19</sup> Zainab Hasan Syarqawi, *Fiqh Seksual Suami Isteri*, (Solo: Media Insani Press, 2003), h. 93

<sup>20</sup>*Ibid*, h 93

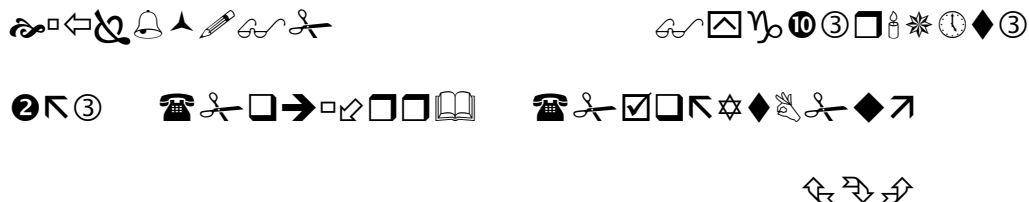
<sup>21</sup>Mushtofa Al-Maraghi Abdullah, *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, (Yogyakarta: LKPSM, 2001), h. 108

<sup>22</sup>*Ibid*

maka ia tidak akan menetapkan salah satunya, tetapi mengambil sikap diam atau meriwayatkan kedua-duanya.

Keempat, mengambil hadits mursal (hadits yang dalam sanadnya tidak disebutkan nama perawinya), dan hadits dhaif (hadits yang lemah, namun bukan ‘maudu’, atau hadits lemah). Dalam hal ini, hadits dhaif didahulukan daripada *qiyas*.<sup>23</sup> Dan kelima adalah *qiyas*, atau analogi. *Qiyas* digunakan bila tidak ditemukan dasar hukum dari keempat sumber di atas.

Dalam pengambilan hukum tentang perjanjian pernikahan ini, Ibnu Qudamah<sup>24</sup> melakukan beberapa langkah istinbath hukumnya Metode istinbath hukum yang digunakan Ibnu Qudamah dalam menetapkan hukum tentang perjanjian pernikahan, sebagai berikut: Al-Qur’an<sup>25</sup> menempati posisi yang sangat fundamental dalam *istinbath*, alasannya terdapat dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat : 1



<sup>23</sup>*Ibid*

<sup>24</sup>Ia adalah seorang ahli *fiqh* dan *zuhud*, namanya Asy Syaikh Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah Bin Ahmad Bin Muhammad Ibnu Qudamah al-Hanbali al-Almaqdisi. Dilahirkan pada bulan Sya’ban 541 H. dan juga Beliau seorang *Mujtahid murajjih* ( *faqihunnafsi* ) ialah mujtahid yang menekuni studi banding antara pendapat-pendapat berbeda dikalangan ulama, baik dalam satu madzhab atau dalam berbagai madzhab, menilai mana yang lebih kuat dalilnya, namun mereka tidak pernah melakukan ijtihad dalam memecahkan masalah baru. Lihat. Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Juz I (t.t : Dar al-Kutb al-Alamiyah, t.th) h. 3

<sup>25</sup> Wabbah Zuhaily, *Ushul Fiqhul Islami*, (Damaskus: Darul Fikri, 1986), h. 420



Artinya: "Hai orang-orang yang beriman sempurnakanlah janji-mu" (Q.S. Al-Maidah ayat 1)<sup>26</sup>

Diserukan kepada orang-orang yang beriman untuk memenuhi akad dan ketentuan yang ada sambil mengingatkan nikmat-Nya menyangkut yang dihalalkan binatang ternak buat mereka. Allah memulai tuntutan ini dengan menyuruh : "Hai orang-orang yang beriman, untuk membuktikan kebenaran iman kalian, penuhilah aqad-aqad itu, baik aqad antara kamu dan Allah yang terjalin melalui pengakuan kamu yang beriman kepada nabinya atau melalui nalar yang dianugerahkannya kepada kamu demikian juga perjanjian yang terjalin antara kamu dengan sesama manusia, bahkan perjanjian antara kamu dengan diri kamu sendiri bahkan semua perjanjian selama tidak mengandung pengharaman yang halal atau penghalalan yang haram."<sup>27</sup>

Salah satu akad yang perlu kamu ingat adalah bahwa telah dihalalkan bagi kamu apa yang sebelum ini diharamkan atas *ahl al-kitab*, yaitu binatang ternak setelah disembelih yakni dihalalkan bagi kamu memakannya, memanfaatkan kulit, bulu, tulang, dll. Dari binatang ternak itu, kecuali atau tetapi yang dibacakan kepada kamu dalam al-Qur'an.<sup>28</sup>

Ayat-ayat yang dimulai dengan panggilan *ya ayyuhalladina amanu* adalah ayat-ayat yang turun dimekkah. Panggilan semacam ini, bukan saja merupakan panggilan mesra, tetapi juga dimaksudkan agar diajak memersiapkan

---

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, op. cit, h. 156

<sup>27</sup> Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah*. (Ciputat: Lentera hati, 2002), h.

<sup>28</sup> *Ibid*



Artinya : “Tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak diminta pertanggungjawabannya” (Q.S. Al-Isra : 34).<sup>31</sup>

Agama Islam tidaklah melarang kita membuat janji dengan sesiapa pun atau mana-mana pihak asalkan janji-janji itu disempurnakan dan ditepati, kerana orang yang menyempurnakan janji itu adalah salah satu tanda orang yang bertakwa, tetapi apa yang berlaku sekarang, perkataan *insyaallah* itu telah disalah guna pakai oleh segelintir orang, sebenarnya lafaz *insyaallah* adalah untuk tujuan menunaikan janji tetapi sekarang lafaz *insyaallah* itu digunakan sebagai alasan tidak memenuhi janji.

Perlu diingat bahwa janji adalah wajib ditepati, manakala ucapan *insyaallah* itu adalah suruhan Allah dan Rasul-Nya ketika berjanji. Ini berarti ucapan *insyaallah* itu bukanlah sebagai alasan untuk tidak menyempurnakan janji yang dibuat dengan berserah kepada kuasa Allah semata-mata. Tetapi perkataan *Inshaallah* yang dilafazkan itu hendaklah disertakan dengan azam untuk menyempurnakan janji agar kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang munafik.

Sebenarnya, janji memang ringan diucapkan namun berat untuk ditunaikan. Manusia dalam hidup ini pasti ada keinginan untuk menikmati pergaulan dengan orang lain. Dari sikap ini, maka menampakkan sikap mulia dalam hubungannya dengan manusia dan terpercaya dalam pergaulannya, maka akan menjadi tinggi kedudukannya dan akan meraih kebahagiaan dunia dan

---

<sup>31</sup>*Ibid.*, h. 429

akhirat. Lain pula ceritanya orang disebaliknya, kecuali jika ia menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak yang terpuji<sup>32</sup>

Menurut as-Sayyid Sabiq bahwa penghormatan terhadap suatu perjanjian hukumnya wajib, jika perjanjian tersebut pengaruhnya positif dan peranannya sangat besar dalam memelihara perdamaian, dan sangat urgen dalam mengatasi kemusykilan, menyelesaikan perselisihan, dan menciptakan kerukunan.<sup>33</sup>

Dalam bentuk apapun, pelanggaran terhadap janji dianggap sebagai dosa besar yang perlu diberikansanksi dan kemurkaan karena menempati janji merupakan salah satu pertanda kesempurnaan kepribadian dan harga diri, serta suatu lambang keadilan.<sup>34</sup>

Lebih lanjut, menurut as-Sayyid Sabiq bahwa penjejalan janji yang dilakukan oleh manusia akan dihisab dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT<sup>35</sup>

Hadits<sup>36</sup>, menempati posisi yang kedua sebagai landasan pengambilan hukum tentang perjanjian untuk tidak berpoligami. Ibnu Qudamah berkata: sebab perbedaan pendapat mereka ini ialah, karena mempertentangkan dalil yang umum dengan yang khusus, hadits Uqbah bin Amir, Rasulullah Saw, bersabda :<sup>37</sup>

---

<sup>32</sup>Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah*. (Ciputat: Lentera hati, 2002), h.

<sup>33</sup> As-Sayyid Sabiq, *OpCit*, h. 99.

<sup>34</sup>*Ibid*

<sup>35</sup>*Ibid*

<sup>36</sup> Wahbah Zuhaily, *Op.Cit*, h. 420

<sup>37</sup>*Ibid*, h. 420, lihat juga, Ibnu Qudamah, *op.cit*, h.448

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، :  
 . : أحقّ الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الـ

Artinya :Telah diceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf dari al-Laist berkata telah diceritakan kepada saya Yazid bin Abi Habib dari Abi al-Khair dari Uqbah bin Amir ra. telah berkata: Rasulullah Saw bersabda: Syarat yang lebih patut untuk dipenuhi yaitu perjanjian yang menyebabkan halalnya kehormatan perempuan. (HR Riwayat Bukhari).<sup>38</sup>

Hadits ini shahih dan diriwayatkan al-Bukhârî dan Muslim, namun demikian menurut paham yang masyhur dalam kalangan ulama ushul fiqh mempergunakan khusus dan mengalahkan yang umum, yaitu memenuhi yang disyaratkan itu.<sup>39</sup>

*Ijma'*<sup>40</sup> menempati posisi ketiga dari metode istinbath. Ibnu Qudamah berkata: adapun pendapat yang kami dengar dari para sahabat setahu kami tidak ada yang berlainan dizaman mereka, bahkan sudah menjadi ijma, diantara ulama berpendapat wajib dipenuhi apa yang sudah disyaratkan kepada isterinya. Umar bin Khatab, Saad bin Waqqas, Muawiyah, Amru bin Ash, Umar bin Abdul Aziz, Jabir bin Zaid, Tawas, Azuai, Ishaq, dan golongan Hambali.<sup>41</sup>

Qiyas<sup>42</sup> menempati posisi keempat dalam metode pengambilan hukum. Diantaranya pada surat Al-Maidah ayat 1, Al-Isra' ayat 34 dan hadits riwayat

---

<sup>38</sup>Imam Bukhari, *Op.Cit* Juz II, h. 276

<sup>39</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash Sidiqiy, *op, cit*, h. 93

<sup>40</sup> Wahbah Zuhaily, *Op.Cit*, h. 628

<sup>41</sup> Sayyid Sabiq, *Op, Cit*, h. 73

<sup>42</sup> Wahbah Zuhaily, *Op.Cit*, h. 636

Uqbah bin Amir, semuanya terdapat adanya ‘*illat*, dasar yang dapat dijadikan hukum pada permasalahan ini, yaitu menepati janji yang merupakan tuntutan *syara*’.<sup>43</sup>

### C. Analisa Terhadap Pemikiran Ibnu Qudamah

Ulama berpendapat bahwa akad nikahnya tetap sah tetapi syarat-syarat tersebut tidak berlaku dan suaminya tidak harus memenuhinya. Pendapat ini dianut oleh mazhab Syafi’i.<sup>44</sup>

Mereka beralasan dengan hadits Nabi Saw :

: . عن عمرو بن عوف المزني رضى الله عنه أن رسول  
المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً

Artinya : Dari Umar bin Auf al-Mazani r.a bahwa Sesungguhnya Rasulullah Saw telah bersabda: “Orang Islam itu terikat dengan syarat yang mereka buat, kecuali syarat menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. (HR. Turmudzi)<sup>45</sup>

Mereka mengatakan bahwa, syarat-syarat di atas dianggap mengharamkan yang halal seperti syarat tidak boleh kawin (poligami) atau tidak boleh berpergian bersama isteri, padahal kedua hal tersebut adalah halal.<sup>46</sup>

Juga hadits Nabi :

---

<sup>43</sup> Sayyid Sabiq, *Op, Cit*, h. 75

<sup>44</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa ‘Adilatuhi*, Juz VII, (Beirut : Dar al-Fikr, 1989), h. 46-47

<sup>45</sup> Ismail al-Kahlani, *Subulu al-Salam*, juz III, (Semarang: Toha Putra, 2003), h. 59.

<sup>46</sup> Ibnu Qudamah, *op.cit*, h.448

عن عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص ومعاوية وعمر  
رضى الله عنهم. . : كل شرط ليس في كتاب الله فهو

Artinya : “Dari Umar r.a dan Sa’ad bin Abi Waqazdan Muawiyah dan Amru bin  
Ash ra. Nabi Saw bersabda: Semua syarat yang tidak sesuai dengan  
kitabullah maka syarat itu batal meskipun seratus syarat”.<sup>47</sup>

Mereka mengatakan bahwa syarat-syarat di atas tidak ada dalam kitab  
Allah, tidak ada ketentuannya dalam agama.<sup>48</sup>

Kemudian segolongan ulama lain berpendapat bahwa syarat di atas, wajib  
dipenuhi oleh suami, jika tidak dipenuhi maka isteri berhak minta fasakh. Mereka  
beralasan dengan hadits Nabi saw :

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن  
أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، :  
. : أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج

Artinya :Telah diceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf dari al-Laist berkata  
telah diceritakan kepada saya Yazid bin Abi Habib dari Abi al-Khair dari  
Uqbah bin Amir ra. telah berkata: Rasulullah Saw bersabda: Syarat yang  
lebih patut untuk dipenuhi yaitu perjanjian yang menyebabkan halalnya  
kehormatan perempuan. (HR Riwayat Bukhari).<sup>49</sup>

<sup>47</sup> Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut Lebanon: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1992), h. 251.

<sup>48</sup> Ibnu Qudamah, *op.cit*, h.448-449

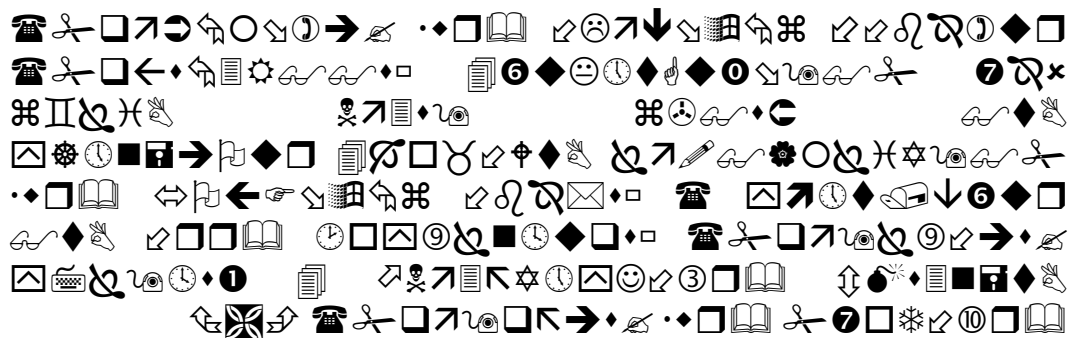
<sup>49</sup> Imam Bukhari, *Op.Cit* Juz II, h. 276

Diriwayatkan oleh Atsram dengan sanadnya sendiri, pernah seorang laki-laki kawin dengan perempuan dengan perjanjian dia tinggal di rumahnya, kemudian suami bermaksud mengajak isterinya pindah rumah, lalu mereka (keluarganya) mengadukannya kepada Umar Ibn Khattab, maka Umar memutuskan perempuan itu berhak atas janji suaminya.<sup>50</sup>

Menurut Ibnu Taimiyah di dalam al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyah sebagai berikut : apabila pihak suami memberikan syarat kepada pihak isteri dalam akad atau mereka sepakat sebelum akad, agar isteri tidak pindah dari rumahnya atau negerinya atau suami tidak kawin lagi, maka isteri berhak minta haknya, syarat seperti itu sah. Demikian menurut mazhab Imam Ahmad.

Telah disebut pendapat Ibnu Qudamah tentang syarat yang manfaatnya kepada isteri maka syarat itu harus dipenuhi oleh suami, yaitu syarat (perjanjian) tidak akan kawin lagi (poligami). Jika syarat tersebut tidak dipenuhi oleh suami maka, isteri dapat minta *fasakh* terhadap suami.<sup>51</sup>

Berkenaan dengan poligami Allah SWT berfirman surat An-Nisa' ayat 3 :



Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya) maka kawinilah

<sup>50</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (terj.) Muh Thalib, Jilid 6, (Bandung: al-Ma’arif, 1997), h. 74.

<sup>51</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, *Op.Cit*, h. 448



wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (Q.S. An-Nisa’:3)<sup>52</sup>

Riwayat yang bersumber dari Ummul Mukminin Aisyah r.a tentang ayat tersebut di atas para mufasir cenderung menerima riwayatnya. Adapun poin-poin yang terkandung dalam riwayatnya adalah:<sup>53</sup>

Larangan tersebut dipahami adanya perintah Allah Swt yang menyuruh menikah wanita-wanita lain selain anak-anak perempuan yatim, rasionanya adalah jika kamu tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak perempuan yatim, yakni yang berada dalam kekuasaanmu, maka lakukanlah pernikahan itu dengan wanita-wanita yang kamu senangi selain dari anak perempuan yatim dua, tiga, empat, Rabbiah berkata tinggalkanlah mereka (anak perempuan yatim), niscaya aku halalkan bagimu menikah hingga empat orang wanita lain selain mereka sehingga kamu tidak dapat berbuat zalim kepada mereka.<sup>54</sup>

Jika dianalogikan dengan perkataan manusia bagaikan seseorang yang mengatakan wanita-wanita selain anak-anak yatim itu banyak dan kamu dapat mengawininya sampai empat orang bila kamu berkehendak.<sup>55</sup>

Masalah poligami di samping dikaitkan dengan tujuan yang mulia juga disyaratkan adanya kesanggupan dari orang yang melakukannya untuk dapat

---

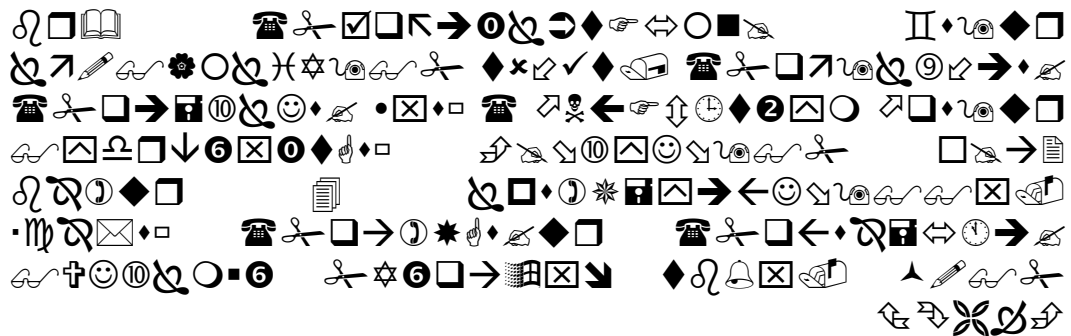
<sup>52</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, op.cit, h. 115

<sup>53</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Op.Cit, h. 448

<sup>54</sup> Syaikh Muhammad al-Madami, *Al-Mujtama' al-Mitsali Kumatuma Zimuhu*, Surat An-Nisa (terj.) Kamaludin Sa'diyatul Haramain, Masyarakat Ideal Dalam Perspektif Surat An-Nisa, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), h. 324

<sup>55</sup> *Ibid.*

berlaku adil jika ia merasa takut tidak dapat berlaku adil maka diwajibkan atasnya untuk tidak berpoligami.<sup>56</sup> Sesuai firman Allah an-Nisa ayat 129 :



Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara isteri-isterimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang.” (Q.S. An-Nisa’ :129)<sup>57</sup>

Berdasarkan ayat di atas keadilan suami pada isteri-isteri tidak hanya pada masalah lahiriah, seperti pembagian giliran pakaian, tempat tinggal, makanan, tetapi laki-laki dituntut berlaku adil dalam hal batiniyah misalnya hubungan seksual, rasa cinta dan kasih sayang.

Ahmad Mushthafa al-Maraghi dalam tafsirnya yang terkenal dengan istilah *Tafsir al-Maraghi* menyebutkan bahwa kebolehan berpoligami yang disebut dalam surat al-Nisa’: 3, merupakan kebolehan yang dipersulit dan diperketat. Menurutnya poligami diperbolehkan hanya dalam keadaan darurat yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Ia kemudian mencatat kaidah fihiyyah “*dar’u al-mafasid muqaddam ‘ala jalbi al-*

<sup>56</sup>*Ibid.*, h. 334

<sup>57</sup> Departemen Agama RI, *op, cit*, h. 143

*mashalih*”.Pencatatan ini dimaksudkan barangkali untuk menunjukkan betapa pentingnya untuk berhati-hati dalam poligami<sup>58</sup>

Pendapat yang senada diutarakan oleh Bisyriy Musthofa dalam kitab tafsir karangannya *al-Ibriz*, menjelaskan bahwa seseorang yang berpoligami tidak akan mampu berbuat seadil-adilnya diantara para isteri, dengan cara apapun. Dalam hal ini keadilan batin (perasaan), akan tetapi seorang suami tidak boleh menelantarkan isterinya. Wajib bagi suami untuk berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Adil yang dimaksud adalah keadilan dalam menggilir para isteri, pemberian nafkah, dan keadilan dalam hal-hal yang bersifat *dhahir* (lahiriyah). Adapun dalam perkara perasaan cinta kepada tiap-tiap isteri, itu pasti tidak bisa sama. Maka dari itu, dalam hal perasaan tidak diwajibkan adanya keadilan. Walaupun demikian yang lebih menjamin terciptanya keadilan adalah menikah dengan satu isteri. Hal ini tidak lain karena kasih sayang dan perhatian suami terfokus hanya kepada seorang istri<sup>59</sup>

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ الشَّيْبَانِيُّ الْبَصْرِيُّ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ  
عَنْ رِبْعَةَ بْنِ سَلِيمٍ، عَنْ بَسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ، - عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَسْقِ مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ".

Artinya : Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata (dalam doa beliau), “Ya Allah, inilah pembagianku (terhadap istri-istriku) yang aku mampu

<sup>58</sup>Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi Juz 4. Mesir: 1394 H/1974 M, hal. 28.

<sup>59</sup>Bisyriy Mushtofa, al-Ibriz, lima’rifati Tafsiri al-Qur’an al’Aziz Juz 4 & 5, tt. Kudus: Menara Kudus, hal. 248.

(lakukan), maka janganlah Engkau mencelaku dalam perkara yang Engkau miliki dan tidak aku miliki(HR. Tirmizhi)<sup>60</sup>

Sedangkan hal-hal di luar kemampuan manusia seperti kecenderungan hati manusia terhadap seorang isteri, tidak terhadap isteri-isteri yang lain, dalam hal itu seorang suami tidak diwajibkan berbuat adil. Nabi Saw pada masa tuanya tampak lebih cenderung pada Aisyah, dibandingkan kepada isteri-isteri lainnya. Tetapi beliau tidak mengistimewakannya dengan sesuatu melebihi yang lain, kecuali berdasarkan kerelaan dan izin mereka beliau pernah mengatakan dalam salah satu riwayatnya:<sup>61</sup>

اللهم ان هذا فيما املك فلا تؤاخذنى فيما لا املك

Artinya: “Ya Allah inilah (Muhammad) pembagianku terhadap apa-apa (isteri-isteri) yang kumiliki kumohon engkau jangan mempermasalahkan dalam hal-hal yang tidak aku miliki.”

Maksud Nabi Saw dengan hal-hal yang tidak dimiliki adalah kecenderungan hati.<sup>62</sup> Pada umumnya para fuqaha klasik seperti Imam Syafi’i dan Abu Hanifah memandang poligami secara tekstual dalam memahami ayat-ayat tersebut tanpa memperhatikan konteksnya, sehingga menurut pendapat mereka laki-laki boleh berpoligami secara mutlak tanpa persyaratan apapun. Bagi al-Syafi’i berpoligami diperbolehkan secara mutlak tanpa persyaratan apapun selama jumlahnya tidak

<sup>60</sup>Sunan Tirmidhi, sunan tirmidhi (Beirut, tth) h. 1140

<sup>61</sup>Ahmad Mustofa al-Maraghi, (terj.) *Tafsir Al-Maraghi Jilid IV*, (Semarang: Toha Putra, 1993), h. 325

<sup>62</sup>*Ibid.*

melebihi empat orang, dalam pembahasannya dalam poligami ia tidak menyinggung tentang keadilan maupun hak isteri terhadap suaminya, kecuali kewajiban penggiliran isteri-isteri nafkah dan kewarisan.

Menurut ulama Hanafiyah keadilan suami pada isteri-isteri lebih ditekankan pada masalah lahiriah akan tetapi laki-laki tidak dituntut berlaku adil yang berkaitan dengan psikis. Poligami ini para fuqoha lebih cenderung melihat perempuan sebagai obyek dan tidak memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki.<sup>63</sup>

Syarat yang menguntungkan isteri, seperti syarat untuk tidak dimadu. Ibnu Qudamah dan Sayid Sabiq misalnya, membolehkan si isteri menuntut *fasakh* apabila suami melanggar perjanjian tersebut.<sup>64</sup>

فلو شرطت الزوجة في عقد الزواج على زوجها الايتزوج عليها  
صح الشرط ولزم وكان لها حق فسخ الزوج اذا لم يف لها الشرط

Artinya :”Apabila seorang isteri mensyaratkan pada waktu akad nikah agar suaminya tidak kawin lagi (memadunya), maka syarat itu sah dan mengikat, dan dia berhak menuntut *fasakh* nikah, apabila suami melanggar perjanjian itu”.<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Umul Baroroh, *Poligami Dalam Pandangan Mufasir Dan Fuqoha*, Sri Suhanjati Syukri, (eds.) *Bias Gender Dalam Pemahaman Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), h. 69

<sup>64</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, *Op.Cit*, h. 448, Lihat juga, Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 169. Dan as-Sayid Sabiq, *Op.Cit*, h. 114

<sup>65</sup> *Ibid*

Menurut Ibnu Taimiyah dalam kitab *Al-Ikhtiyarat al-Fiqyah* berpendapat sebagai berikut, apabila suami memberikan syarat kepada pihak isteri pada akad atau sebelum akad, agar si isteri tidak pindah dari rumahnya/negerinya, suami tidak kawin lagi, maka isteri berhak meminta haknya syarat seperti itu sah.<sup>66</sup>

Tengku Muhammad Hasbi Ash Siediqiy berpendapat pada keharusan memenuhi segala syarat yang manfaatnya kepada wanita, sehingga dia mau dinikahi dan jika tidak dipenuhi maka, si wanita boleh menfasakh pernikahan itu.<sup>67</sup>

Dari pernyataan tersebut, dapat kita pahami bahwa suami mempunyai tanggung jawab kepada isterinya. Artinya, isteri telah mensyaratkan kepada suami untuk menepati janji yang telah diucapkan atau ditepati pada waktu akad nikah, bila tidak ditepati, maka suami akan melanggar hak isteri atau suami meninggalkan kewajibannya.

Di dalam kitab *Al-Umm* Imam Syafi'i berpendapat : sebuah persyaratan yang tidak ada dalam kitab Allah adalah batal, karena Rasulullah Saw, membatalkan setiap persyaratan yang tidak ada dalam kitab Allah adalah batal, beliau juga beralasan bahwa Allah Swt menghalalkan kepada seorang laki-laki mengawini empat orang wanita, apabila isterinya mensyaratkan padanya. Bahwa suami tidak boleh kawin lagi, maka isteri itu melarang hak suami tentang apa

---

<sup>66</sup> Tengku Muhammad Hasby Ash Sidiqie, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum*, Jilid VIII, (Jakarta: Yayasan Tengku Muhammad Hasbi Ash Sidiqiy, 2001), h. 92

<sup>67</sup> Muhammad Ibnu Idris Asyafi'i, *al-Umm*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1973), h. 107

yang telah dilapangkan oleh Allah Swt kepadanya.<sup>68</sup> Mereka beralasan dengan Hadits rasulullah Saw.

عن عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص ومعاوية وعمر  
رضى الله عنهم. : كل شرط ليس في كتاب الله فهو

Artinya : “Dari Umar r.a dan Sa’ad bin Abi Waqazdan Muawiyah dan Amru bin Ash ra. Nabi Saw bersabda: Semua syarat yang tidak sesuai dengan kitabullah maka syarat itu batal meskipun seratus syarat”.<sup>69</sup>

Bahwasanya syarat di atas tidak ada dalam al-Qur’an, karena *syara’* tidak menghendaknya. Mereka juga beralasan hadits Rasulullah SAW:

عن عمرو بن عوف المزني رضى الله عنه أن رسول الله ص.  
المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً

Artinya : Dari Umar bin Auf al-Mazani r.a bahwa Sesungguhnya Rasulullah Saw telah bersabda: “Orang Islam itu terikat dengan syarat yang mereka buat, kecuali syarat menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.  
(HR. Turmudzi)<sup>70</sup>

<sup>68</sup> HS. A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, ( Jakarta: Pustaka Amani, 1989, h. 34

<sup>69</sup> Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut Lebanon: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1992), h. 251.

<sup>70</sup> Ismail al-Kahlani, *Subulu al-Salam*, juz III, (Semarang: Toha Putra, 2003), h. 59.

Syarat-syarat di atas dianggap mengharamkan yang halal seperti, kawin lagi (poligami) dan berpergian, kedua hal itu halal dan syarat tersebut tidak akan menambah kebaikan akad dan bukan tujuan akad.

Pendapat ini dianut oleh sebagian ulama, di antaranya Zuhri Qatadah, Hisyam bin Urwah, Malik bin Laits, Tsuari, Syafi'i, Ibnu al-Mundzir dan Ashab al-Ra'yi<sup>71</sup>

Jadi, berdasarkan argumen penulis paparkan perjanjian atau syarat tidak akan berpoligami dalam akad nikah, menurut dasar al-Qur'an suratan-Nisa ayat 3, menyatakan boleh. Poligami diperbolehkan (mubah) artinya, apabila kamu mampu kawinilah wanita-wanita lainnya yang kamu senangi dua, tiga, empat, jika kamu takut berlaku adil, maka satu orang isteri saja.

Adapun mengenai perjanjian untuk tidak berpoligami dalam akad nikah adalah sah syaratnya tidak sia-sia, mengikat dengan akad, apabila perjanjian tidak ditepati oleh suami kepada isteri pada waktu akad nikah termasuk perjanjian tersebut di atas tergolong syarat rusak dan mengikat dengan akad.

Analisa penulis berlandaskan pada pandangan ulama yang mengatakan bahwa syarat tersebut harus ditunaikan oleh sang suami nantinya, yang mana para ulama mengambil kesimpulan pada dasar hukum terdapat didalam surat al-Maidah ayat 1:

---

<sup>71</sup> Ibnu Qudamah, *loc. cit*





Artinya: “Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu,.” (Q.S. al-Maidah :1)<sup>72</sup>

Dan dari riwayat Ibnu Abbas r.a bahwa yang dimaksud dengan akad nikah ialah perjanjian yang telah diadakan Allah terhadap hamba-hambanya yaitu, apa-apa yang telah diharamkan dan apa-apa yang dihalalkan apa-apa yang telah diwajibkan dan apa-apa yang telah dibataskan dalam al-Qur’an seluruhnya bahwa semua itu tidak boleh dilanggar.<sup>73</sup>

Dengan kata lain akad ada tiga macam, perjanjian Allah dengan hambanya, perjanjian diri sendiri dan perjanjian diri dengan orang lain, bahwa setiap mukmin berkewajiban menunaikan apa yang telah dijanjikan dan diakadkan, baik merupakan perkataan atau perbuatan, sebagaimana diperintahkan Allah selagi yang dijanjikan dan diakadkan itu tidak bersifat menghalalkan barang haram atau mengharamkan barang halal.<sup>74</sup>

Surat al-Isra’ ayat : 34



<sup>72</sup> Departemen Agama RI, *op, cit*, h. 156

<sup>73</sup> Ahmad Mustofa al-Maraghi, Jilid VI, *op, cit*, h. 76

<sup>74</sup> *Ibid.*

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban” (Q.S. al-Isra’: 34)<sup>75</sup>

# Kata



“bermakna : “ Tunaikanlah apa yang kamu janjikan kepada Allah”, senantiasa menunaikan apa yang dibebankan kepadamu maupun apa yang dijanjikan kepada manusia seperti akad-akad muamalat, dalam jual-beli, sewa menyewa dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud menunaikan janji adalah memeliharanya menurut cara yang di izinkan oleh syari’at.<sup>76</sup>

Terdapat dalam hadits Uqbah bin Amir rasulullah Saw bersabda :

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن  
أبي الخير عن عقبة بن عامر رضى الله عنه، :  
. : أحقّ الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج

Artinya :Telah diceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf dari al-Laist berkata telah diceritakan kepada saya Yazid bin Abi Habib dari Abi al-Khair dari Uqbah bin Amir ra. telah berkata: Rasulullah Saw bersabda: Syarat yang lebih patut untuk dipenuhi yaitu perjanjian yang menyebabkan halalnya kehormatan perempuan. (HR Riwayat Bukhari).<sup>77</sup>

Menurut penulis juga, bahwa perjanjian telah disepakati bersama pada akad nikah bila tidak ditepati, maka akan terjadi sesuatu problema atau konflik di antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian, maka yang dapat terjadi timbul

<sup>75</sup> Departemen Agama RI, *op, cit*, h. 429

<sup>76</sup> Ahmad Mustofa al-Maraghi, Jilid V, *op, cit*, h. 80

<sup>77</sup>Imam Bukhari, *Op.Cit* Juz II, h. 276

akibat hukum yaitu di antara salah satu pihak ada yang dirugikan, karena di sini isteri meminta perjanjian sebelum akad nikah. Bahwa suami tidak boleh berpoligami, maka yang mengalami kerugian pihak isteri. Perlu kita ketahui bahwa pendapat Ibnu Qudamah yang tercantum diatas, tidak bisa lepas dari kondisi masyarakat tempat beliau tinggal (Syuriah), dimana poligami merajalela. Beliau berkesimpulan bahwa akan sangat sulit mendidik masyarakat yang poligamus karena tidak adanya jaminan keadilan diantara para anggota keluarga. Laki-laki di Syuriah lebih mengutamakan kenikmatan seksual semata dan menuruti hawa nafsunya. Oleh karena itu, berdasarkan kaidah fiqh “mencegah kerusakan didahulukan dari menarik kemaslahatan”.<sup>78</sup>

Dan merujuk juga pada pendapat Wahbah Zuhaili di dalam bukunya *al-Fiqh wa Adillatuhu*, mensyaratkan agar suami tidak berpoligami sah dimasukkan ke dalam syarat *ta'liq*. Karena ianya syarat tersebut tidak termasuk mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram kerana ia hanya sebuah perkara yang diperbolehkan.<sup>79</sup> Contoh mengharamkan yang halal ialah mensyaratkan agar suami tidak menyetubuhinya. Karena perjanjian tersebut bukan *mubah* merupakan sebuah kewajiban yang menjadi hak suami yang perlu ditaati isteri.

Sayyid Sabiq juga menjelaskan di dalam bukunya, *Fiqh al-Sunnah* bahwa menjadi hak perempuan mensyaratkan suami untuk tidak poligami. Jika syarat yang diberikan oleh isteri ini dilakukan ketika *ijab qabul*-nya supaya dia tidak

---

<sup>78</sup> Sayyid Sabiq, *op.cit*, h. 74

<sup>79</sup> Wahbah Zuhaily, *Op.Cit*, h. 636

dimadu, maka syarat ini sah dan mengikat, dan dia berhak membatalkan perkahwinan jika syarat ini tidak dipenuhi oleh suaminya, dan hak membatalkan perkahwinan ini tidak hilang selagi si isteri tidak mencabutnya dan rela dengan pelanggaran suaminya.<sup>80</sup>

Begitu juga pendapat Imam Ahmad dan dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Karena syarat-syarat ini dalam perkahwinan lebih penting nilainya daripada jual beli, sewa-menyewa dan sebagainya. Oleh sebab itu, memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh isteri lebih wajib dipenuhi.

Dan penulis juga melihat dari tujuan dipersyaratkan perjanjian ini merupakan sebuah jalan yang terbaik untuk menuju keluarga yang sakinah, merujuk daripada pendapat Dr. Mahmud Syaltout dalam bukunya *Perbandingan Mazhab*, menjelaskan bahwa perceraian lewat perjanjian perjanjiantalak (ta'lik talak) adalah jalan terbaik dalam melindungi wanita atas perbuatan tidak baik dari pihak suami. Sekiranya seorang suami telah mengadakan perjanjian perjanjiantalak ketika akad nikah akan dilaksanakan dan bentuk perjanjian itu telah disepakati bersama, maka perjanjian tersebut dianggap sah untuk semua bentuk perjanjian, sehingga terjadinya pelanggaran bagi pihak suami, maka isteri dapat meminta cerai kepada pengadilan.<sup>81</sup>

Sementara itu, jumhur ulama mazhab berpendapat bahawa bila seseorang telah men-*ta'liq*-kan talaknya kemudian telah terpenuhi syarat-syaratnya sesuai dengan kehendak mereka masing-masing, maka *ta'liq* itu dianggap sah untuk

---

<sup>80</sup>Sayyid Sabiq, *op.cit*, h. 74

<sup>81</sup>Mahmud Syaltout dan M. Ali As-Sayis.(1993). *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih*. Terj.oleh Dr. Ismuha. (Jakarta: Bulan Bintang). Cet. VII, h. 145

semua bentuk *ta'liq*, baik ia mengandung sumpah (*qasamy*) ataupun mengandung syarat biasa, kerana orang yang menta'liqkan talak itu tidak menjatuhkan talaknya pada saat orang itu mengucapkannya, akan tetapi talak itu tergantung kepada terpenuhinya syarat yang dikandung dalam ucapan *ta'liq* itu.

Hukum Islam tidak mengatur teknis dan bagaimana pelaksanaanya agar poligami dapat dilaksanakan, bila diperlukan dan tidak terjadi masalah atau pihak yang dirugikan dan tidak berbuat sewenang-wenang terhadap isteri, maka hukum Islam di Indonesia perlu mengatur dan merincinya.<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> Ahmad Rofiq, *Op.Cit*, h. 169

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Akad nikah yang disertai dengan syarat oleh isteri kepada suami untuk tidak berpoligami menurut Ibnu Qudamah adalah sah, apabila tidak dipenuhi perkawinannya dapat difasakhkan.
2. Metode istinbath hukum Ibnu Qudamah adalah Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 1, surat al-Isra' ayat 34, Hadits Nabi SAW dari Uqbah bin Amir riwayat Bukhârî Muslim, Ijma' menempati posisi ketiga dari metode istinbath. Ulama berpendapat wajib dipenuhi apa yang sudah disyaratkan kepada isterinya. (Umar bin Khatab, Saad bin Waqqas, Muawiyah, Amru bin Ash, Umar bin Abdul Aziz, Jabir bin Zaid, Tawas, Azuai, Ishaq, dan golongan Hambali) dan yang keempat, yaitu *qiyaz* dalam metode pengambilan hukum. Diantaranya pada surat Al-Maidah ayat 1, Al-Isra' ayat 34 dan hadits riwayat Uqbah bin Amir, semuanya terdapat adanya '*illat*, yaitu dasar yang dapat dijadikan hukum.
3. Pendapat Ibnu Qudamah untuk tidak berpoligami merupakan tujuan yang baik pada masa ia bertempat tinggal, sehingga tidak bertentangan dengan hukum Islam yang telah di analisa oleh penulis.

#### **B. Saran-saran**

1. Bahwa tafsiran agama dan masalah sosial kemasyarakatan mempunyai problem-problem di segala bidang kehidupan. Bagi pakar hukum dan pakar fiqh, untuk itu diperlukan suatu pengkajian ulang secara tuntas terhadap

tafsiran agama dan problema sosial kemasyarakatan yang implikasinya terhadap ajaran dan perilaku manusia, kajian tersebut menyangkut identifikasi akar permasalahan dan strategi pemecahannya.

2. Untuk itu pemuda sebagai generasi penerus janganlah malas dan putus asa dalam mencapai keilmuan yang lebih luas demi masa depan bangsa, negara dan umat Islam.
3. Penelitian berkaitan dengan perjanjian pernikahan tentang berpoligami dalam sebuah pernikahan sebagaimana dilakukan penyusun dalam kesempatan ini masih terbuka bagi peneliti-peneliti selanjutnya. Selain karena dalam penelitian ini mengkaji pemikiran tokoh yakni Ibnu Qudamah, studi ini belum cukup untuk ukuran penelitian yang sempurna.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2003, cet. ke-2
- Abdul Aziz Dahlan (eds.) *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Iktiyar Baru Vann Deve, 1997)
- Abdul Manan dan M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Pengadilan Agama*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2002)
- Abdul Qadir Badran, terjemah Syaikh Muwafaq *Muallif al-Mughni dalam al-Mughni*, (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt)
- Abdurrahman al-Jaziry, *Fiqh 'Ala Madzahib al-'Arba'ah*, Juz IV (Beirut: Dar al-Fikr, t.th)
- Abdurrahman I. Doi, *Perkawinan dan Syari'at Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992)
- Abu Malik bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, ter. Khairul Amru Harahap, Faisal Saleh, cet.2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)
- Ahmad Mustofa al-Maraghi, (terj.) *Tafsir Al-Maraghi Jilid IV*, (Semarang: Toha Putra, 1993)
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997)
- Amir syarifuddin, *Hukum Islam Di Indonesia, Antar Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009)
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1998)
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, ( Jakarta : 1997)
- H.S. M. Nasruddin Latif, *Ilmu Perkawinan Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, (Bandung : Pustaka Hidayat, 2001)
- HS. A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, ( Jakarta: Pustaka Amani, 1989)
- Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Juz. I, (t.t : Dar al-Kutb al-Alamiyah, t.th)
- \_\_\_\_\_, *al-Mughni*, Juz. VII, (t.t : Dar al-Kutb al-Alamiyah, t.th)



\_\_\_\_\_, *al-Muqni'*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, t.th.)

Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1992).

Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz. II, (Lebanon: Dar al-Kitab al-Alamiyah, t.th)

Ismail al-Kahlani, *Subu al-Salam*, juz III, (Semarang: Toha Putra, t.th)

Kaelany HD, *Islam dan Aspek-aspek Kemasyarakatan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000)

Kholil Rahman, *Hukum islam di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995)

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Departemen Agama RI Deriktorat Jendral  
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam 1997/1998

Muhammad Ibnu Idris Asyafi'i, *al-Umm*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1973)

Redaksi Sinar Grafika, *UU Pokok Perkawinan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000)

S. A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, terj. Agus Salim, *Hukum Perkawinan Islam*,  
(Jakarta : Pustaka, 1998)

Saleh bin Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, terj. Abdul Hayyie al-Khattani, dkk, (Jakarta:  
Gema Insani Press, 2005)

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Muh. Thalib, (Bandung: al-Ma'arif, 1997)

Syaikh Hassan Ayyub, *Fikih Keluarga*, terj. M.Abdul Ghofar, cet 1, (Jakarta:  
Pustaka al-Kautsar, 2001)

Syaikh Muhammad al-Madami, *Al-Mujtama' al-Mitsali Kumatuma Zimuhu*, Surat  
An-Nisa (terj.) Kamaludin Sa'diyatul Haramain, Masyarakat Ideal  
Dalam Perspektif Surat An-Nisa, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002)

Syekh Islam Taimiyah, *al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyah*, (Libanon: Dar al-Ilmiyah, 1995)

Tengku Muhammad Hasby Ash Sidiqie, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum*, Jilid VIII,  
(Jakarta: Yayasan Tengku Muhammad Hasbi Ash Sidiqiy, 2001)

*Undang-Undang Pokok Perkawinan*, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2002)

Wahbah al-Zuhaily, *al-Figh al-Islam wa 'Adilatuhu*, Juz VII, (Beirut :Dar al-Fikr,  
1989)

Wardi Bahtiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997)

Zainab Hasan Syarqawi, *Fiqh Seksual Suami Isteri*, (Solo: Media Insani Press, 2003), h. 93